

**PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG  
ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN  
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh:*

**M. MUAMAR**

2100113

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2007**

**Drs. Maksun, M.Ag**

d/a: Perum Griya Permai A. 22.

Tambakaji Ngaliyan

Semarang

---

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : -

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas

An. Sdr. M Muamar

Syari'ah IAIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Muamar

NIM : 2 1 0 0 1 1 3

Jurusan : SIYAYAH JINAYAH (SJ)

Judul : PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG  
ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN  
BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Juli 2007

Pembimbing

**Drs. Maksun, M.Ag**

**NIP. 150 263 040**

**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km.2 Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara :

Nama : M. Muamar  
Nim : 2100113  
Jurusan : SIYASAH JINAYAH (SJ)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Etika Politik Dalam  
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Telah memunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal :

**27 JULI 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun  
Akademik 2006/2007.

Semarang,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Drs. H. A. Fatah Idris, M.Ag**

NIP: 150 216 494

Penguji I,

**Drs. Maksun, M.Ag**

NIP: 150 263 040

Penguji II,

**Achmad Arief Budiman, M.Ag**

NIP: 150 274 615

**Drs. Taufik CH, MH**

NIP: 150 263 036

Pembimbing

**Drs. Maksun, M.Ag**

NIP: 150 263 040

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan nara sumber yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juli 2007

Deklarator,

**M. Muamar**  
**NIM. 2100113**

## ABSTRAK

Dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi, tentunya tidak terlepas dari unsur kebebasan berpendapat yang –biasanya berujung pada perbedaan pendapat– esensinya adalah untuk membangun peradaban menjadi lebih baik. Islam sebagai agama yang diturunkan ke bumi untuk membimbing umatnya ke arah yang benar, sebagaimana tujuan diturunkannya al-Qur’an adalah untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil berdasarkan etika yang dapat dipertahankan di bumi ini. Nurcholish Madjid (Cak Nur), merupakan salah satu cendekiawan Islam yang produktif dalam hal merespon persoalan moral politik di Indonesia, Pemikiran Cak Nur di bidang politik sangat relevan dengan kondisi di Indonesia baik pada masa lalu maupun pada masa kini, terutama ketika etika politik kurang mendapat perhatian dari para pelaku politik.

Pemikiran Cak Nur di bidang politik, menarik perhatian penulis untuk menelitinya menjadi sebuah karya ilmiah. Adapun fokus penelitian, dengan fokus masalah, bagaimana pemikiran Nurcholis Madjid tentang etika politik ditinjau dari fiqh siyasah? Dan bagaimana relevansi pemikiran Nurcholis Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian?

Dengan metode dokumentasi, penulis berusaha menghimpun dan mengumpulkan data-data tentang konsep etika politik. Disini penulis menggunakan buku-buku karangan Nurcholis Madjid yang membahas persoalan etika politik. Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan metode komparatif.

Setelah penulis mengadakan penelitian, penulis menghasilkan beberapa kesimpulan. Konsep etika politik yang ditawarkan Cak Nur adalah cara berpolitik yang berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi negara kita (Pancasila dan UUD 45) yang mana nilai-nilai tersebut menjadi pijakan kita bersama dalam usaha membina dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Cak Nur, Islam pernah menjadi tauladan sebuah sistem politik. Prinsip persamaan, prinsip keadilan, tanggung jawab dan lain sebagainya, yang dikemukakan Cak Nur juga sama dengan konsep Islam politik, di sinilah secara teologis, Cak Nur membuat bangunan teoritis mengenai keterkaitan organik antara nilai-nilai iman itu dengan demokrasi, keadilan, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan (yang sering diterjemahkannya sebagai “kehendak bersama” bahkan suatu “kontrak sosial”).

Sedangkan relevansi konsep etika politik Cak Nur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Cak Nur dengan pikiran jernih menjelaskan hubungan tak langsung antara agama dan negara, yaitu pada level etika politik. Agama memberi dukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepada kemaslahatan bersama. Tiga nilai etika politik yang amat kompatibel dengan agama yang selalu Cak Nur elaborasi adalah: demokrasi, keadilan dan keterbukaan. Persis di sinilah Cak Nur menegaskan arti Pancasila sebagai *common platform* atau titik temu nilai-nilai dari semua suku, ras, golongan, dan khususnya agama-agama yang ada di Indonesia.

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

( الروم: ٤١ )

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari laknat (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

(Q.S. Ar-Ruum: 41).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 326.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada semua pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. Maksun, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran dan koreksi kepada penulis.
3. Ayahanda dan Ibunda tersayang dan tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan baik secara moril maupun materiil selama penulis mengenyam bangku pendidikan sejak kecil –formal maupun informal– hingga akhir nanti.
4. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo baik dosen, staf, teman-teman mahasiswa, yang telah membimbing, membantu, dan mendorong dalam proses belajar di fakultas tercinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Walaupun demikian, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga mohon saran dan kritik konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih.

*Wassamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 12 Juli 2007

**Penulis**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan kesengajaan, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang telah mengukir jiwa ragaku serta mencurahkan kasih-sayangannya dan memberikan dorongan baik moril maupun materiil, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya mendapat gelar sarjana.
2. Mbak Nung n Mas Misdar, semoga sukses selalu, ”kan aku bisa selalu minta uang buat beli pulsa he2x”, dan apa yang selama ini diinginkan dikabulkan Allah SWT. Mbak Anis n Mas Najat, semoga sukses juga buat kalian “kan nanti aku dikasih uang terus buat jajan he2x", serta kedua keponakanku yang cuantik dan imut2 Lek U’Ang menyayangi kalian berdua. Oya hampir lupa...Nenekku tersayang semoga masih diberi kesehatan dan panjang umur.
3. Buat “Adhek” ter.....(pokoknya ter...semua), makasih banget ya atas semua yang kau berikan padaku.....(semoga keinginan kita dikabulkan Allah SWT. Amin... ”S E M @ N G @ @ @ T.....!!!”).
4. Bu’ Mun (Hj. Zuhar Asmun) dan keluarga tercinta, terima kasih tak terhingga buat beliau yang selama ini mau menerima saya sebagai “anaknya”.
5. Buat teman-teman kos “BONDET”, makasih banget ya selama ini telah menemaniku dalam susah dan senang. Pak Gentong, Pak Ateng, dan semua Pom Boy Ngaliyan, makasih ya kalian telah memberi kenang-kenangan yang banyak buatku. Lek Irfan, maturnuwun engkang katah..... Wabil khusus Mas Fatwa, yang menemaniku baik susah maupun senang, tetep semangat ya....
6. Mas Ading dan Mbak Ifa, Mas Imam H.S. Kholisoh (makasih semangatnya), Kang Dul, Kang Zaenal, Kang Kholib, Mas Lutfi dan semua Cah C’alvain I Miss U All Forever.....
7. Dan segenap jajaran sahabat, teman, dan kenalan di manapun kalian, berada yang tidak akan disebutkan satu persatu (biar cepet, nyebutnya dua perdua ya...), makasih banyak atas bantuannya selama ini. Semoga Allah membalasnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penulisan Skripsi .....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA POLITIK</b>	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Politik .....	17
B. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Politik .....	27
C. Konsep Etika Politik Dalam Islam .....	29
<b>BAB III   NURCHOLISH MADJID DAN KONSEP ETIKA POLITIKNYA</b>	
A. Biografi Nurcholish Madjid .....	34
B. Corak Pemikiran dan Karya-karyanya .....	38
C. Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Etika Politik .....	42

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP ETIKA POLITIK  
NURCHOLISH MADJID DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA  
DAN BERNEGARA**

A. Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Etika Politik Ditinjau dari Fiqh Siyasah .....	55
B. Analisis Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Etika Politik Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Konteks Kekinian .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran .....	74
C. Penutup .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi, tentunya tidak terlepas dari unsur kebebasan berpendapat yang esensinya adalah untuk membangun peradaban menjadi lebih baik.<sup>1</sup> Dewasa ini, pemahaman demokrasi dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat masih sering disalahtafsirkan. Perbedaan pendapat seringkali ditafsirkan sebagai konflik yang harus di lawan dengan kekuatan fisik, padahal dalam membangun demokrasi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar.

Menurut Abu Hapsin, persoalan ini muncul sebagai dampak dari proses transisi di bidang politik dan ekonomi yang sedang dialami bangsa Indonesia. Dalam bidang ekonomi Indonesia terbawa arus sistem ekonomi kapitalistik, sedang dalam bidang politik mengalami perubahan mendasar dari sistem sentralistik menuju sistem desentralisasi yang ditandai dengan kehendak melakukan sistem otonomi lokal, sistem multi partai, meningkatnya kebebasan pers serta partisipasi masyarakat bawah yang ditandai dengan semakin meningkatnya *body politic* dalam turut serta menentukan kebijakan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hamdan Daulay, *Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, Cet. ke-1, 2001, hlm. 94.

<sup>2</sup> Abu Hapsin, *Kenapa Politisi Kita Tidak Beretika*, Jurnal Justisia. Edisi 25, Tahun 2004, hlm 25.

Ketidakmampuan negara untuk melakukan pengelolaan konflik membuka peluang bagi mereka yang selama ini merasa tertindas untuk mengungkapkan apa yang selama ini terpendam, memang tidak semua aspirasi mereka masuk akal atau proporsional.<sup>3</sup> Dalam kondisi perubahan seperti inilah konflik-konflik muncul dan memuncak yang mengakibatkan terjadinya krisis multidimensional.

Tak mungkin dipungkiri lagi, realitas perpolitikan bangsa kita masih jauh dari harapan. Panggung perpolitikan kita seringkali dikotori oleh adu fisik –pertarungan– dan perebutan kekuasaan di tingkat elit politik. Menurut S. Prayitno, gejala ini bisa dilihat pada perilaku partai-partai politik saat berebut konstituen. Fungsi partai politik yang semestinya dapat mendidik dan mencerdaskan rakyat agar mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, namun ternyata justru larut dalam permainan politik yang membingungkan rakyat.<sup>4</sup> Segala cara ditempuh untuk meraih kekuasaan meski mengorbankan rakyat dan dengan ongkos sosial yang tidak sedikit. Agama, etnisitas dan ideologi menjadi komoditi yang laku untuk melanggengkan perselisihan dan upaya merebut kekuasaan.

Terjadinya krisis dan konflik di negeri ini yang berkepanjangan tidak bisa diselesaikan oleh satu lapisan masyarakat saja, tetapi harus oleh segenap komponen bangsa, baik elit politik maupun masyarakat umum. Menurut AS.

---

<sup>3</sup> Muhammad AS Hikam, *Konflik Dan Resolusi Konflik Etnik di Indonesia; Perspektif Konflik Kewarganegaraan*, Makalah Lokakarya dan Temu Nasional BEM Indonesia, UPN Veteran Yogyakarta, 6-9 Agustus 2002.

<sup>4</sup> S. Prayitno, *Penguatan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Nasional Sesuai Tap MPR-RI No/5/MPR/2000*, Makalah Temu Forum Komunikasi Etnis Lokal Prop Jateng, Badan Kesbanglinmas Jawa Tengah, Hotel Kesambi Hijau, 26-27 Agustus 2003.

Hikam, dalam pencarian resolusi konflik perlu dipisahkan dahulu antara pemicu (*trigger*) konflik yang kasat mata (*manifest*) dengan sebab-sebab utama yang biasanya tidak tampak karena berada dalam struktur dan berkaitan dengan dimensi sosial–budaya, politik, ekonomi dan kelembagaan di dalamnya.<sup>5</sup>

Menurut Yahya A. Muhaimin, kehidupan demokratis paling tidak memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati dan memerlukan penerapan etika politik, termasuk di sini ialah nilai-nilai budaya yang tertanam pada warga masyarakat. Aturan dan norma-norma ini berada pada posisi sentral untuk bisa menyelesaikan pertentangan dan konflik kepentingan antar warga negara.<sup>6</sup>

Islam sebagai agama yang diturunkan ke bumi untuk membimbing umatnya ke arah yang benar, sebagaimana tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil berdasarkan etika yang dapat dipertahankan di bumi ini.<sup>7</sup>

Islam telah memberikan konsepsi perpolitikan dengan adanya perintah menaati ulil amri, termasuk di dalamnya penguasa bidang politik, pemerintah dan negara. Tetapi Islam menghendaki ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Allah. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya maka wajib

---

<sup>5</sup> Muhammad AS. Hikam, *op. cit.*

<sup>6</sup> Yahya A. Muhaimin, Etika Pembangunan Politik, dalam Nourouzzaman Shiddiqi et al, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. ke-1, 1986, hlm. 47.

<sup>7</sup> Fazlur Rohman, *Tema Pokok al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983, hlm. 54.

ditaati. Sebaliknya jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka boleh di kritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang persuasif. Jika cara tersebut tidak dihiraukan oleh pemimpin, maka boleh saja pemimpin itu tidak dipatuhi.<sup>8</sup> Sebagaimana telah dijelaskan Nabi SAW:

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال ((.... فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)). (رواه مسلم)

*Artinya: “.....Maka jika penguasa memerintahkan berbuat maksiat, maka tidak harus di dengarkan dan ditaati.” (H.R. Muslim).<sup>9</sup>*

Krisis dan konflik berkepanjangan yang terjadi di Indonesia tidak pernah terselesaikan sebagai dampak dari rendahnya moralitas penyelenggara negara itu sendiri. Al-Qur’an telah mengisyaratkan kejadian seperti ini dalam Surat Ar-Ruum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم: ٤١)

*Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada*

<sup>8</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2000, hlm. 92.

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim; Bab Wujud Al-Tha’ah Al Umara’ Fi Ghairi Ma’shiat*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, tt, hlm. 1469.

*mereka sebagian dari laknat (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S. Ar-Ruum: 41).<sup>10</sup>*

Krisis dan konflik yang melanda Indonesia ini, tidak jauh beda dengan yang dicontohkan dalam ayat diatas, yaitu sebagai akibat dari perbuatan manusia yang tidak lagi berpegang pada moralitas agama. Akan tetapi mewujudkan tatanan kehidupan sebagaimana diajarkan dalam agama bukanlah hal mudah. Karena kita hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam, dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda, sehingga tidak mudah menyatukan mereka dalam satu wadah tatanan normatif. Realitas inilah yang menjadi tantangan baru bagi para pemikir muda Islam, mereka harus mampu menjawab persoalan tersebut.

Proses aktualisasi perilaku elit politik pada semua aspek kehidupan manusia baik sosial, politik maupun ekonomi memerlukan suatu upaya yang terorganisir yaitu suatu upaya membebaskan umat manusia dari sistem kehidupan yang dzalim, menuju suatu sistem kehidupan yang adil dan diridloi Allah SWT. Proses ini terdiri dari perubahan sistem berfikir, bersikap serta bertindak individu dimasyarakat dalam menuju pembangunan dan penciptaan realitas baru yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran.

Salah satu cendekiawan Islam yang produktif dalam merespon persoalan moral politik di Indonesia adalah almarhum Nurcholish Madjid (selanjutnya disebut Cak Nur), yang menuangkan pemikirannya secara tertulis

---

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 326.

dalam bentuk artikel, makalah maupun esai yang dibukukan. Pemikiran Cak Nur di bidang politik sangat relevan dengan kondisi di Indonesia baik pada masa lalu maupun pada masa kini, terutama ketika etika politik kurang mendapat perhatian dari para pelaku politik. Pemikiran politik Cak Nur tentang kebangsaan memberi renungan amat penting tentang hubungan agama dan negara, yang muncul kembali di era otonomi daerah melalui banyak peraturan daerah yang bersifat keagamaan. Salah satu pemikirannya yaitu konsep etika politik. Beliau menyatakan bahwa kaum elit politik menanggung beban berat dalam masyarakat yaitu tanggung jawab menjaga moralitas dan etika sosial, dengan cara menarik pelajaran dari lingkungan hidupnya.<sup>11</sup>

Cak Nur adalah sebuah fenomena untuk konteks masyarakat Indonesia. Sifat fenomenal tokoh ini dapat kita lihat pada fakta bahwa dengan kekuatan pribadi dan pemikirannya, Nurcholish Madjid mampu melahirkan pengaruh terhadap perubahan-perubahan tertentu di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh dan perubahan-perubahan itu bisa bersifat institusional dan literer. Secara institusional, hasil dari pengaruh kekuatan pribadinya itu bisa terlihat dalam wujud dan kinerja spesifik organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) di masa kepemimpinannya dan beberapa periode setelah itu. Tapi pengaruh institusional yang paling mencolok dari Cak Nur adalah Yayasan Paramadina. Melalui lembaga ini, Cak Nur meletakkan pengaruhnya bukan saja pada sosialisasi pemikiran-pemikirannya, melainkan juga pada terbentuknya sebuah komunitas tertentu (walaupun masih samar-

---

<sup>11</sup> Nurcholish Madjid, *Fatsoen Nurcholish Madjid*, Jakarta: Republika, 2002, hlm. i.

samar). Secara literer, kehadiran Cak Nur telah memperkaya khazanah literatur intelektual di negara kita. Ini ditandai bukan saja oleh publikasi pemikiran-pemikirannya sendiri, melainkan studi diri dan pikirannya. Dalam arti kata lain, baik melalui pemikiran-pemikirannya maupun publikasi studi-studi tentangnya, hal ini dengan sendirinya melahirkan dinamika intelektual di negara dan masyarakat kita. Melalui karya-karyanya itu, kita bukan saja mendapat bahan untuk memahami dunia intelektual Indonesia, melainkan juga memberikan landasan bagi perdebatan dan pengelanaan intelektual lebih lanjut bagi generasi-generasi mendatang.<sup>12</sup>

Cak Nur sebagai seorang cendekiawan yang menaruh investasi besar pada persoalan-persoalan kemanusiaan dan demokrasi, mencoba memandang dan mengkritisi berbagai persoalan yang berkembang, dengan bersandar pada pijakan kritik yang teduh penuh ketajaman dalam membingkai persoalan. Pijakan kritik yang teduh dan penuh ketajaman, tampaknya selaras dengan anjuran Cak Nur, bahwa umat Islam harus menjadi golongan yang terbuka, yang bisa tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi, dan bersikap sebagai pamong, agar mampu menjadi pengayom bagi sesama; tetapi tetap bersandar pada etika komunikasi yang bijak, karena ajaran agama pun memberi tahu pada kita, untuk bertegur sapa dalam keteduhan dan penuh kesantunan.<sup>13</sup>

Secara umum pemikiran Islam Cak Nur memang sangat komprehensif, dalam arti mencakup semua ajaran Islam dan kehidupan

---

<sup>12</sup> Fachry Ali, *Dalam Intelektual, Pengaruh Pemikiran dan Lingkungannya*, Pengantar Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm. xxi-xxii.

<sup>13</sup> Edy A. Effendi, *Pengantar Dialog dan Wacana Keterbukaan.....*, *ibid.*, hlm. xvii.

manusia, dengan berbagai pendekatan: filosofis, historis, sosiologis, dan seterusnya. Ia juga mencakup tidak hanya pemikiran Islam kontemporer, tetapi juga pemikiran klasik, terutama sejak Cak Nur berkenalan dengan dan mendukung ide-ide Fazlur Rahman yang berwatak neo-modernis, dengan menggunakan kaidah *al-muhafazhat 'ala al-qadim al-shahih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (mempertahankan tradisi atau pemikiran lama yang masih relevan dan mengambil pemikiran baru yang lebih relevan) dengan aspek-aspek yang lainnya.<sup>14</sup>

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik, dan mengangkatnya dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik ditinjau dari fiqh siyasah?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian?

---

<sup>14</sup> Masykuri Abdillah, Dalam Cak Nur, Politik Islam dan Cita-cita Reformasi, *Prof. Dr. Nurcholish Madjid; Jejak Pemikiran dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-2, 2003, hlm 364-365.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik ditinjau dari fiqh siyasah.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian.

### D. Telaah Pustaka

Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal sebagai sosok yang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah baik dalam bentuk artikel, makalah maupun essainya yang telah dibukukan. Banyak penelitian yang telah mengkaji pemikirannya, dalam telaah pustaka ini penulis berusaha untuk menunjukkan bahwa masalah yang dibahas dalam skripsi ini betul-betul relevan dan menarik serta belum ada yang mengkajinya maka akan disebutkan beberapa penelitian yang pernah mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid.

Sufyanto dalam bukunya "*Masyarakat Tamadun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*".<sup>15</sup> Buku ini melakukan kajian yang memfokuskan terhadap pemikiran Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani dan membedahnya secara mendetail dan mendalam, hanya saja dalam buku ini tidak dikaitkan gagasan tentang masyarakat madani dengan wacana dan kekuasaan.

---

<sup>15</sup> Sufyanto, *Masyarakat Tamadun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, Cet. ke-1, 2001.

Buku lain ditulis oleh Sukidi dengan judul “*Teologi Inklusif Cak Nur*”<sup>16</sup> buku ini memperbincangkan persoalan pluralisme agama, secara normatif Islam mengakui hak dan keberadaan agama lain sesuai firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh/2:256. Pengakuan ini, secara otomatis merupakan prinsip dasar doktrin Islam terhadap pluralisme agama dan sosial budaya sebagai kehendak Tuhan. Pembahasan seputar persoalan pluralitas agama yang dilakukan Sukidi ini hanya berupa tulisan-tulisan pendek sehingga kajiannya kurang mendalam, dan belum menyentuh persoalan etika berpolitik dalam pluralitas umat.

Buku lain yang membahas tentang pemikiran Nurcholish Madjid adalah buku karangan Siti Nadroh yang berjudul *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*.<sup>17</sup> Buku ini sebagian besar adalah isi tesis Siti Nadroh pada program pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Pandangan Keagamaan Nurcholish Madjid Dalam Perspektif Paham Keagamaan Post Modernisme*”. Dalam hal ini Siti Nadroh mempunyai maksud mendeskripsikan secara lebih utuh tentang konsistensi persepsi keagamaan Nurcholish Madjid. Dalam buku ini juga dibahas tentang pemikiran politiknya yaitu mengenai pembaharuan politik.

Di samping itu, Samsurizal Panggabean menulis tentang pemikiran Nurcholish Madjid yang berjudul “*Energi Utopia Nurcholish Madjid*”, dalam artikel ini Samsurizal mencoba mendeskripsikan kembali pemikiran

---

<sup>16</sup> Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Jakarta: Kompas, Cet. ke-2, 2001.

<sup>17</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Rajawali, 1999.

Nurcholish Madjid tentang pembaharuan Islam di Indonesia yang merupakan aspek menarik dari kontroversi Nurcholish Madjid yang merebak sejak ceramah budaya di TIM (Taman Ismail Marzuki). Dalam artikel ini Cak Nur juga menjelaskan tentang pluralisme keagamaan, tema yang relatif baru dalam pemikiran Islam maupun agama-agama lain. Dalam hal ini Samsurizal mencoba menjelaskan kembali agenda-agenda yang disebut Nurcholish Madjid dalam ceramah di TIM yaitu “*Demokratisasi, Modernisasi, Civilisasi Bangsa*” yang merupakan muara sebagian besar gagasan dan tafsiran Nurcholish Madjid yang dianggap kontroversial. Proposal yang diajukan Nurcholish Madjid pada intinya adalah formasi nilai yakni pengesahan dan pengasuhan norma yang akan menjadi kerangka rujukan dalam hidup bermasyarakat. Menurut beliau bahwa peran agama dalam bidang formasi kebijakan atau politik praktis, apalagi aliansi agama-negara, tidak ditekankan. Bahkan beliau menganggap penekanan akhir muslim pada penggunaan agama secara politik ideologis merupakan efek kolonialisme dan politik kepartaian dalam dekade 1950-an. Proposal tersebut merupakan kelanjutan dari pendekatan *Islam Yes, Partai Islam No.*<sup>18</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang sudah dilakukan belum ada yang secara khusus membahas tentang tema etika politik yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid. Sehingga pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam.

---

<sup>18</sup> Samsurizal Panggabean., “*Enerji Utopia Nurcholish Madjid*” *Ulumul Qur’an*, No. 1, Vol. IV. Tahun 1993.

## E. Metode Penulisan Skripsi

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengadakan studi terhadap catatan-catatan dan dokumen-dokumen yakni tulisan dari pemikiran Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan etika politik.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa literatur yang meliputi hasil karya tulis kepustakaan, bacaan-bacaan tentang teori, penelitian dan berbagai macam jenis dokumen<sup>19</sup> yang bisa tertuang dalam buku, jurnal, majalah, tesis, karya tulis hasil penelitian dan lain-lain. Data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua kategori:

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Atau secara sederhana biasa disebut dengan sumber asli.<sup>20</sup> Dalam hal ini meliputi bahan-bahan yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan yakni buku karangan Nurcholish Madjid yang membahas persoalan etika politik.

---

<sup>19</sup> Saefudin Azwar, M.A. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 36.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 91.

#### b. Data Sekunder

Data ini biasa disebut dengan data tangan kedua, yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan subyek penelitian.<sup>21</sup> Data tersebut adalah data yang berasal dari pemikiran tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yang dipergunakan untuk melengkapi dan memperjelas data primer.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data-data yang berupa artikel, makalah, surat kabar, majalah buku-buku dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Di sini penulis mendokumentasikan pemikiran Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan tema etika politik dan juga pemikiran dari tokoh lain sebagai tambahan.

### 4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul dipakai metode-metode sebagai berikut:

#### a. Metode Deskriptif Analisis

Untuk menganalisa data yang sudah diperoleh, penulis menggunakan metode yang sesuai dengan jenis data yaitu non-statistik.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 133.

Mengingat bahwa data yang di inventarisir adalah data dokumen tertulis maka penulis menggunakan metode deskriptif.<sup>23</sup> Metode ini hanya menggambarkan pemikiran Nurcholish Madjid sebagaimana adanya agar mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai pemikirannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*).<sup>24</sup>

b. Metode Analisis Isi (*Content Analysis*)

Metode ini berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi semua ilmu sosial. Metode ini dimaksudkan guna memperoleh pengetahuan yang baru dari beberapa obyek yang diteliti. Dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode yang bersifat *content analysis*,<sup>25</sup> yakni dengan menganalisis makna yang terkandung pada seluruh gagasan Nurcholish Madjid. Dalam analisis ini, penulis menganalisis isi terhadap pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik.

Analisis isi (*content analysis*) merupakan analisis ilmiah yang mencakup upaya:

- 1) Klasifikasi tanda yang dipakai dalam komunikasi.
- 2) Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi.

---

<sup>23</sup> Saefudin Azwar M.A., *op. cit.*, hlm. 127.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

3) Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.<sup>26</sup>

Ini merupakan sajian yang bersifat generalisasi, artinya temuannya akan menghasilkan sumbangan teoritik.

c. Komparatif

Metode komparatif<sup>27</sup> adalah membandingkan antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya. Dengan upaya mendeskripsikan dan menilai data terkait kemudian membandingkan dengan pemikiran tokoh yang diteliti dengan pemikiran tokoh lainnya. Dalam konteks ini adalah pemikiran Nurcholish Madjid dengan para pemikir lainnya yang membahas etika politik. Selanjutnya, penulis membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksinya sendiri.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam mencerna permasalahan yang akan dibahas, dan supaya diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik, Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi. Bab ini merupakan pengantar terhadap penelitian ini dan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah.

---

<sup>26</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hlm. 68.

<sup>27</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1995, hlm. 95.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang etika politik, yang meliputi pengertian dan ruang lingkup etika politik, prinsip-prinsip dasar etika politik dan konsep etika politik dalam Islam.

Bab ketiga, menguraikan Pemikiran Etika Politik Nurcholish Madjid, pada bab ini berisi tentang biografi Nurcholish Madjid, corak pemikiran Nurcholish Madjid dan karya-karyanya, dan pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik.

Bab keempat, memuat tentang analisis terhadap konsep etika politik Nurcholis Madjid dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada bab ini berisi tentang konsep etika politik Nurcholish Madjid ditinjau dari fiqh siyasah, dan relevansi pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian.

Bab kelima, memuat penutup yang berisi beberapa kesimpulan, saran-saran dan penutup sebagai akhir dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA POLITIK

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Politik

Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. Dengan keambrokan itu muncul pertanyaan bagaimana seharusnya masyarakat ditata. Dalam dunia modern etika politik muncul kembali dengan kuat sebagai akibat dari perluasan jangkauan kekuasaan manusia yang juga memperluas jangkauan masalah yang harus diputuskannya. Agar keputusan-keputusan yang kompleks itu diambil dengan memperhatikan segi-segi yang tidak boleh dikorbankan, diperlukan prinsip-prinsip etis penataan masyarakat.<sup>1</sup>

Untuk memahami etika politik secara mendalam akan dimulai dahulu dengan pembahasan mengenai etika secara umum. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti; tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat kebiasaan.<sup>2</sup> Dalam bahasa Indonesia etika sama artinya dengan kesusilaan yang berasal dari bahasa sansekerta “*su*” yang berarti baik, dan “*sila*” yang berarti norma kehidupan, sedang dalam peristilahan Islam perkataan etika dikenal dengan sebutan “*akhlak*”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet. ke-2, 1988, hlm. iii.

<sup>2</sup> K Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-5, 2000, hlm. 3.

<sup>3</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1994, hlm. 1.

Adapun mengenai pemaknaan etika secara terminologi, banyak pendapat menurut beberapa tokoh, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Franz Magnis Suseno, etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas atau usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus kalau ia mau menjadi baik.<sup>4</sup>
2. Menurut Agus Makmurtomo dan Munawir, etika adalah bagian dari filsafat moral yang merupakan ilmu normatif tentang perbuatan manusia mengenai benar atau tidak ataupun yang baik bagi manusia yang dimengerti oleh akal murni untuk memasyarakat.<sup>5</sup>
3. Menurut K. Bertens, etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas, atau dengan kata lain etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral.<sup>6</sup>
4. Menurut Ahmad Amin, etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.<sup>7</sup>
5. Menurut Robert C. Soimon seperti dikutip M Amin Syukur, etika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai hidup manusia

---

<sup>4</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika dasar*, Jakarta: Kanisius, Cet. ke-6, 1993, hlm. 17.

<sup>5</sup> Agus Makmurtomo dan Munawir, *Etika (Filsafat Moral)*, Jakarta: Wira Sari, Cet. ke-1, 1989, hlm. 12.

<sup>6</sup> K Bertens, *Etika, op. cit.*, hlm 15.

<sup>7</sup> Ahmad Amin, *Ethika; Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 15.

yang sesungguhnya dan hukum tingkah laku. Dengan demikian, menurut Amin Syukur, etika adalah ilmu yang berisi kaidah baik dan buruk suatu perbuatan dan aktivitas.<sup>8</sup> Seperti diungkapkan oleh Poedjowijatna, sebagai sebuah ilmu, obyek materi etika adalah manusia, sedang obyek formalnya adalah tindakan manusia yang dilakukan secara sengaja.<sup>9</sup>

Dalam rangka menjernihkan istilah, perlu juga disimak perbedaan antara etika dengan etiket, etika dengan moral dan etika dengan akhlak, karena kerap kali istilah-istilah tersebut dicampur adukkan.

a. Etika dan etiket

Etika dengan etiket keduanya memang menyangkut perilaku serta mengatur perilaku manusia secara normatif (memberi norma pada perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan manusia) sehingga kedua istilah tersebut mudah dicampur adukan padahal perbedaan diantaranya sangat hakiki.<sup>10</sup>

Perbedaannya adalah etiket menyangkut "cara" suatu perbuatan harus dilakukan manusia (cara yang tepat) artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam kalangan tertentu. Misalnya jika menyerahkan sesuatu kepada atasan maka harus menggunakan tangan kanan dan dianggap melanggar etiket jika menggunakan tangan kiri. Sedangkan etika tidak terbatas pada "cara" melakukan suatu perbuatan, etika memberi

---

<sup>8</sup> M Amin Syukur, *Etika Keilmuan*, Jurnal Theologia, Semarang: Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo, Edisi No 28, Juni Tahun 1999, hlm. 2.

<sup>9</sup> Poedjawijatna, *Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-7, 1990, hlm. 15.

<sup>10</sup> K Bertens, *op. cit.*, hlm. 8.

norma pada perbuatan itu sendiri, apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Sebagai contoh mengambil barang milik orang lain tanpa izin tidak diperbolehkan (jangan mencuri) merupakan suatu norma etika. Sehingga mencuri menggunakan tangan kanan atau kiri, disini sama sekali tidak relevan.

Selain itu etiket bersifat relatif, sesuatu yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika lebih bersifat absolut semisal jangan mencuri, jangan berbohong merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar.<sup>11</sup>

b. Etika dan moral

Etika dengan moral sebagaimana diungkapkan Franz Magnis Suseno bahwa ajaran moral langsung mengajarkan bagaimana orang harus hidup, berupa rumusan sistematis terhadap anggapan-anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-kewajiban manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang nilai-nilai ajaran moral. dalam pengertian yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang moral, jadi etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran yaitu refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, dan istilah-istilah moral.<sup>12</sup>

Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>12</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, PT. Gramedia, 1993, hlm. 31-32.

bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

c. Etika dan akhlak

Istilah etika dalam Islam disinonimkan dengan perkataan akhlak, yang dalam bentuk jamak *khuluq* yang berarti adab atau batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela.<sup>13</sup> Akhlak secara istilah adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia diatas bumi. Sistem nilai yang di maksud adalah ajaran Islam, dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berfikirnya.<sup>14</sup>

Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* mengartikan etika atau akhlak yaitu:

الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الافعال بسهولة ويسر من

غير حاجة الى فكر ورؤية

*Artinya: "Khuluq (akhlak) ialah haihat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang dengan musuh dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan".<sup>15</sup>*

Dalam Islam tolak ukur kelakuan baik dan buruk selalu merujuk pada ketentuan Allah. Bahwa apa yang dinilai baik oleh Allah pasti baik pada essensinya. sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surat Thoha ayat 8:

<sup>13</sup> Barmawei Umary, *Materia Akhlak*, Solo: Ramadhani, Cet. ke-11, 1993, hlm. 1.

<sup>14</sup> Muslim Nurdin, ed. *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: CV. Alfabet, hlm. 205.

<sup>15</sup> Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Sirkahu, t.t, hlm.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى { 8 }

*Artinya: “Dialah (Allah) tiada tuhan selain Dia. Dia mempunyai sifat-sifat yang terpuji (al-Asma’ul al-Husna)”. (QS. Thoha : 8).<sup>16</sup>*

Menurut Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, bahwa antara akhlak dan etika memiliki sisi kesamaan dan juga perbedaan yang mendasar. Sisi kesamaannya adalah antara akhlak dan etika sama-sama membahas tentang baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai obyeknya. Sementara sisi perbedaannya terletak pada sumber norma, etika bersumber dari rasio, sedang akhlak bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits.<sup>17</sup>

Memperhatikan beberapa uraian di atas, bisa dipahami jika sering terjadi penyamaan arti antara etika dengan etiket, etika dengan moral, maupun etika dengan akhlak. Karena antara keempat istilah tersebut (etika, etiket, moral dan akhlak) meskipun mempunyai perbedaan arti yang cukup mendasar akan tetapi keempat istilah tersebut sama-sama menjadikan “baik dan buruk” perbuatan manusia sebagai obyeknya.

Etika sebagai salah satu cabang dari filsafat, hanya dapat memberikan penilaian terhadap masalah yang baik dan jahat, susila dan tidak susila dari perbuatan manusia. Karena ada perdebatan seputar ukuran baik dan buruk inilah akhirnya memunculkan aliran-aliran dalam etika. Secara umum kebaikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan dan

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 249.

<sup>17</sup> Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 45.

diusahakan serta menjadi tujuan setiap manusia. Sedangkan keburukan adalah kebalikannya.<sup>18</sup> Poedjawijatna membagi aliran-aliran etika tersebut sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Aliran Hedonisme, aliran ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang mengandung kenikmatan dan perasaan puas. Rasa puas sama dengan bahagia, mencari kepuasan merupakan salah satu faktor yang mendorong manusia untuk bertindak.
2. Aliran Utilitarianisme, aliran ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berguna untuk mencapai tujuan (utilis; berguna). Di dalam politik apa saja, fitnah, khianat, kekerasan, dan paksaan boleh (baik) asal berguna untuk mencapai tujuan.
3. Aliran Vitalisme, aliran ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Manusia yang berkuasa itulah manusia yang baik. Apa saja yang dilakukan oleh orang kuat dijadikan pedoman untuk rakyat dan orang banyak.
4. Aliran Sosialisme, aliran ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang ditentukan oleh masyarakat (tindakan manusia yang menjadi anggotanya). Apa yang lazim dianggap baik oleh masyarakat tertentu, itu baik. Atau disebut juga ukuran sosialistik.
5. Aliran Religionisme, aliran ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

---

<sup>18</sup> Muhammad Nasuha, *Jurnal Theologia, op. cit.*, hlm. 6.

<sup>19</sup> Moekijat, *Azas-Azas Etika*, Bandung: Masdar Maju, Cet. ke-1, 1995, hlm. 11-12.

6. Aliran Humanisme, aliran ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan kodrat manusia, yaitu kemanusiaan yang sesuai dengan derajat manusia, jadi tidak mengurangi atau menentang kemanusiaan. Dalam hal ini harus memperhatikan tinjauan obyektif dan subyektif. Contoh, makan terlalu banyak dengan kesengajaan untuk mencari kesenangan hingga sakit, ini dengan sengaja mengurangi derajat kemanusiaan.

Selanjutnya akan diterangkan pengertian politik. Kata politik sebenarnya berasal dari kata Yunani “*polis*” yang berarti kota yang berdaulat. Pengertian ini berdasarkan pemikiran filsafat mengenai negara yang terjalin dengan definisi-definisi yang berasal dari zaman kuno. Menurut bangsa Yunani kuno, politik sama artinya dengan kecakapan bernegara. Dengan perkataan lain, aturan tentang kehidupan bersama dalam negara.<sup>20</sup>

Plato dan Aristoteles memandang politik terutama dalam terma-terma tujuan moral yang dicari oleh para pembuat keputusan. Bagi keduanya, “*polis*” ada untuk mencari kebaikan umumnya, kebaikan warga dan kesempurnaan moral.<sup>21</sup> Oleh karena itu, pembahasan tentang politik sebagai bagian dari kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang negara-negara. Namun berdasarkan pemaknaan para perilaku politik, politik dimaknai sebagai perkara yang berkaitan dengan kekuasaan, baik pencapaian kekuasaan maupun upaya mempertahankan kekuasaan, dimana kekuasaan sangat

---

<sup>20</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2004, hlm.26.

<sup>21</sup> Abdul Rasid Moten, *Political Science; An Islamic Perspective*, Terj. Munir, A. Mulin dan Widyawati, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 2001, hlm. 21.

berkaitan dengan kepentingan. Oleh karena itu dalam politik kepentingan menjadi penentu.<sup>22</sup>

Yusuf Al-Qardhawy menjelaskan bahwa politik dalam kosa kata bahasa arab adalah *as-siyasah*, merupakan masdar dari kata *sasa yasusu* yang pelakunya *sa'is*. Istilah ini menekankan aspek kepemimpinan dengan menukil Ibnu Mansur dalam lis'anul arab yang berkata tentang kosa kata *sawasa* sebagai berikut, *As sus* berarti kepemimpinan. Dengan demikian dapat dikatakan *sasuhum susan*. Jika mereka mengangkat seseorang menjadi pemimpin, dapat dikatakan *sawwasuhu waasasuhu*, *wasasa al-imra siyasah*, yang artinya seseorang mengatur urusan politik, seseorang yang mengatur atau memimpin suatu kaum dapat disebut *sasah wasawwas*.<sup>23</sup>

Untuk lebih mempertegas pengertian-pengertian diatas, Deliar Noer menyatakan bahwa politik pada umumnya berkenaan dengan dua hal, yakni kekuasaan dan susunan masyarakat.<sup>24</sup> Dengan penjelasan yang sama Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa politik berkaitan dengan masalah kekuasaan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dengan demikian yang paling essensial dalam definisi itu adalah tentang kekuasaan.

Setelah dijelaskan pengertian etika dan politik secara umum, selanjutnya akan memasuki pembahasan berikutnya yaitu permasalahan etika

---

<sup>22</sup> Dorothy Pickles, *Introduction to Politics*, Terj. Sahat Simamora, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 1.

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *As-Siyasah Asy-Syari'iyah*, Terj. Kathur Sunardi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999, hlm. 34-35.

<sup>24</sup> Dikutip oleh Liang Ge, *Ilmu Politik*, Jakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 1990, hlm.11.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, maka etika politik berarti suatu standar nilai yang disarikan dari nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan teoritik dalam mempersoalkan dan menjelaskan legitimasi politik serta budaya politik masyarakat. Yang bermaksud mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia, baik manusia sebagai individu maupun manusia sebagai warga negara<sup>26</sup>

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, obyektif dan argumentatif. Jadi etika politik tidak dapat langsung mencampuri politik praktis, sebagaimana etika pada umumnya tidak dapat menetapkan apa yang harus dilakukan seseorang. Tugas etika politik adalah subsider; membantu agar pemahaman masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhhotbahi para politikus, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.<sup>27</sup>

Menurut Aristoteles sebagaimana dikutip Franz Magnis Suseno dalam *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, menulis

---

<sup>26</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik...*, *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. iii.

bahwa identitas manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik. Apabila negara itu buruk, maka orang yang baik sebagai warga negara, dalam artian orang yang dalam kehidupannya selalu sesuai dengan aturan negara adalah buruk, atau bisa dikatakan jahat sebagai manusia. Tetapi sebaliknya dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia dalam artian manusia yang benar-benar bertanggung jawab, akan buruk sebagai warga negara karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan negara itu.<sup>28</sup>

Dengan demikian etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Karena berfungsi sebagai sarana kritik ideologi, maka etika politik bersifat reflektif, membahas bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, serta membantu usaha masyarakat dalam menegawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Semisal merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani supaya sesuai dengan martabat manusia dan sebagainya.<sup>29</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Politik**

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan usaha perumusan etika politik tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. vi-vii.

1. Prinsip bersikap baik terhadap siapa dan apa saja yang ada, prinsip ini terwujud dalam prinsip kesejahteraan umum yang mempunyai relevansi politik tinggi, yang berisi bahwa semua tindakan dan kebijaksanaan harus demi keuntungan sebesar-besarnya dari orang sebanyak-banyaknya asal saja tidak melanggar hak dan keadilan.<sup>30</sup> Prinsip ini menuntut suatu pengetahuan tepat tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang masing-masing baik bagi yang bersangkutan.<sup>31</sup>
2. Prinsip Keadilan, prinsip ini mengatakan bahwa kita wajib untuk memperlakukan semua orang dengan adil, artinya menghormati hak-hak dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama.<sup>32</sup> Adil pada hakekatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Tuntutan dasar keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang.<sup>33</sup>
3. Prinsip menghormati keutuhan manusia, prinsip ini menuntut tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri, bahkan demi tujuan yang baik ia jangan pernah membiarkan diri dipakai sebagai alat saja, diperas, diperkosa dan diperbudak.<sup>34</sup> Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian dan berkehendak yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 134.

Prinsip-prinsip ini mempunyai implikasi-implikasi yang sangat relevan untuk etika politik, misal bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia, dan sebagai manusia mereka harus diperlakukan sama dalam masyarakat dengan hak-hak dasar yang sama. Serta berhak atas kebebasannya yang dibatasi oleh kebebasan yang sama luasnya dari setiap anggota masyarakat demi kepentingan bersama. Disamping itu bahwa kebaikan dan keadilan yang ditunjukkan kepada orang lain perlu diimbangi dengan sikap yang menghormati diri sendiri sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri.

### C. Konsep Etika Politik Dalam Islam

Etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan etika yang diartikan oleh para ilmuwan barat. Bila etika barat sifatnya *antroposentrik* (berkisar sekitar manusia) maka etika Islam bersifat *teosentrik* (berhubungan dengan Tuhan).<sup>36</sup>

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk menentukan tingkah laku yang baik dan buruk. Islam tidak mendasarkan konsep *al-ma'ruf* (yang baik) dan *al-munkar* semata-mata pada rasio, nafsu, intuisi dan pengalaman-pengalaman yang muncul lewat panca indera yang selalu mengalami perubahan. Tetapi Islam telah memberikan sumber yang tetap yang menentukan “baik dan buruk” yang tetap dan universal, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Tohari Musnamar, Etika Dan Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam; Sumbangan Terhadap Pembangunan, dalam Nourouzzman Shiddiqi, dkk. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. ke-1, 1986, hlm. 83.

<sup>37</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1994, hlm. 180-181.

Dalam etika Islam penilaian terhadap perbuatan baik dan buruk selalu dihubungkan dengan amal sholeh atau dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka, hal ini tidak berlaku bagi etika barat. Di samping itu dalam etika Islam tidak saja mengemukakan pedoman-pedoman yang dikehendaki untuk berlaku sebagaimana dalam etika normatif, melainkan juga mengandung ajaran moral.<sup>38</sup>

Dalam konteks perpolitikan (politik sebagai suatu kegiatan) maka etika politik selalu berada dalam kerangka sistem nilai Islam, namun pengaturan tersebut tidak bersifat kaku artinya diserahkan pada umatnya melalui jalan ijtihad. Sebagaimana ungkapan Faisal (seorang cendekiawan muslim Malaysia) sebagaimana dikutip Abdul Aziz Thaba, masalah politik dan negara adalah termasuk dalam urusan keduniawian yang bersifat umum. Panduan al-Qur'an juga as-Sunnah bersifat umum, oleh yang demikian permasalahan politik termasuk dalam urusan ijtihad umat Islam. Tujuan ulama atau cendekiawan Islam ialah berusaha untuk terus-menerus menjadikan dasar al-Qur'an itu sebagai sistem yang kongkrit supaya dapat diterjemahkan di dalam pemerintahan dan negara di sepanjang zaman.<sup>39</sup>

Pada zaman Rasulullah dan Khulafa' al-Rasidin dapat dipastikan, beliau-beliau itu disamping pimpinan agama sekaligus juga pemimpin negara. Konsep *Imamah* yang mempunyai fungsi ganda (memelihara agama sekaligus mengatur dunia) dengan sasaran kemaslahatan umum, hal ini menunjukkan

---

<sup>38</sup> Tohari Musnamar dalam Nourouzzman Shiddiqi, dkk, *op. cit.*, hlm. 83.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1996, hlm. 40-41.

betapa eratnya interaksi antara Islam dan politik. Tentunya dalam hal ini politik dimengerti secara mendasar, meliputi serangkaian hubungan aktif masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan.<sup>40</sup>

Ditambahkan oleh Abdul Munir Mul Khan, bahwa politik yang dijalankan oleh seorang muslim sekaligus berfungsi sebagai alat dakwah. Sehingga sudah tentu politik yang dijalankan bukanlah politik sekuler, melainkan politik yang penuh komitmen pada Allah. Tujuan yang diletakkan oleh politik semacam ini bukanlah kekuasaan demi kekuasaan, atau pencapaian suatu kepentingan demi kepentingan itu sendiri, karena semua ini bukanlah tujuan akhir. Semua itu merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan sesungguhnya, yaitu pengabdian pada Allah.<sup>41</sup>

Dalam ajaran Islam ditemukan banyak prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat dijadikan sebagai prinsip dasar kegiatan politik. Menurut penelitian Tahir Azhary sebagaimana dikutip Abdul Azis Thaba dalam "*Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*", ditemukan sedikitnya sembilan prinsip negara hukum menurut al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah.<sup>42</sup>

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan

---

<sup>40</sup> MA. Sahal Mahfudh, *op. cit.*, hlm. 209.

<sup>41</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Ideologi Gerakan Dakwah; Episod Kehidupan M Natsir dan Azhar Basyir*, Yoyakarta: Sypress, 1996, hlm. 193.

<sup>42</sup> Abdul Aziz Thaba, *op. cit.*, hlm. 43-44.

4. Prinsip persamaan
5. Prinsip persekutuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip pengadilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat

Selain kesembilan prinsip tersebut, berdasarkan analisis para ahli tafsir terhadap isi yang terkandung dalam piagam Madinah, secara garis besar ditemukan empat belas prinsip-prinsip pokok yang mengatur kehidupan politik pemerintahan. Piagam Madinah merupakan dokumen atau perjanjian persahabatan antara Muhajirin-Ansori-Yahudi dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka, dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan dibawah Nabi.<sup>43</sup>

Adapun keempat belas prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip umat, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip hubungan antar pemeluk agama, prinsip pertahanan, prinsip hidup bertetangga, prinsip tolong menolong dan membela yang lemah dan teraniaya, prinsip perdamaian, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan, prinsip ketaqwaan (amar ma'ruf dan nahi munkar).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. ke-2, 1996, hlm. 114.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

Dalam sudut pandang gerakan Islam, prinsip-prinsip etika politik tersebut mempunyai tiga fungsi pokok antara lain; *Pertama*, sebagai pandangan ideal untuk menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan doktrin Islam. Suatu contoh penjajah belanda misalnya dinilai kafir sehingga wajib dilawan oleh kaum muslimin. *Kedua*, sebagai nilai-nilai yang membentuk sikap dan tingkah laku muslim, sehingga dikenal adanya muslim yang shaleh dan kurang shaleh. Konsekuensinya adalah seorang pemimpin muslim dipatuhi apabila keshalehannya tidak diragukan, sehingga tidak mengherankan jika banyak pemimpin pergerakan Islam berasal dari kalangan ulama dan kiai, atau figur yang terkenal keshalehannya. *Ketiga*, sebagai perekat solidaritas sosial serta sebagai pemersatu dalam mengatasi pembelahan sosial.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

## BAB III

### NURCHOLISH MADJID DAN KONSEP ETIKA POLITIKNYA

#### A. Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid yang akrab disapa Cak Nur lahir di Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 M (26 Muharram 1358 H). Ia adalah seorang cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal dengan gagasannya tentang pembaharuan Islam. Lahir di kalangan keluarga pesantren. Ayahnya H. Abdul Madjid, seorang kiai jebolan pesantren Tebu Ireng, Jombang yang juga merupakan salah satu murid kesayangan pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari. Ibunya adalah anak dari Kiai Abdullah Sadjad yang juga teman baik KH. Hasyim Asy'ari.<sup>1</sup>

Pendidikan Cak Nur dimulai dari Sekolah Rakyat (SR), sekolah resmi pertama yang didirikan pemerintah Indonesia, dan Madrasah Ibtidaiyah (sore hari) yang didirikan oleh ayahnya. Setelah tamat SR pada tahun 1952 Ia melanjutkan ke pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Di sini Cak Nur hanya dapat bertahan selama dua tahun dengan menyelesaikan Ibtidaiyah dan sedang melanjutkan Tsanawiyah. Selama dua tahun di pesantren ini, Cak Nur merasa tidak kerasan karena dua alasan; *pertama*, karena alasan kesehatan, *kedua*, karena alasan ideologi politik, sebab ayah Cak Nur meski orang NU tetapi aktifis masyumi. Dengan menyitir pendapat fatwa KH. Hasyim Asy'ari sebagai ijthad politik "*Masyumi merupakan satu-satunya wadah aspirasi*

---

<sup>1</sup> Nur Khalid Ridwan, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002, hlm. 37-38.

*umat Islam Indonesia*”, sehingga meskipun saat itu NU sudah keluar dari masyumi, ayah Cak Nur tetap mendukung kepentingan politik masyumi. Akibatnya banyak teman santri di Darul Ulum yang meledeknya dengan julukan “anak masyumi yang kesasar”. Akibatnya Ia tidak betah dan kemudian pindah ke pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.<sup>2</sup>

Di Pondok Gontor, Cak Nur menemukan suasana yang lain dari sebelumnya, suasana lebih terbuka, liberal tidak tersekat oleh golongan tertentu dan terikat dengan madzhab imam tertentu. Di Gontor, Cak Nur selalu menunjukkan prestasi yang baik, sehingga dari kelas satu Ia bisa langsung loncat naik ke kelas tiga. Karena prestasinya yang cukup baik, ketika tamat pada tahun 1960 sang guru bermaksud mengirimnya ke Universitas Al-Azhar Mesir. Namun rencana tersebut gagal akibat kesulitan mendapat visa sebagai dampak dari kegoncangan yang sedang terjadi di Mesir. Sebagai gantinya Cak Nur masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>3</sup>

Pendidikan yang diperoleh Cak Nur di Gontor sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektualnya, sehingga menghasilkan keluasan wawasan yang dijadikan bekal saat pergi ke Jakarta. Di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cak Nur mengambil Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Untuk menambah wawasan keahsaannya Ia mengikuti kursus bahasa perancis dan beberapa bahasa lain, serta mulai menulis di

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987, hlm. Sampul.

beberapa media massa. Dunia tulis menulis dimulai ketika artikel berbahasa arab tentang Fiqh Umar yang diterjemahkannya dimuat dalam majalah Gema Islam, majalah milik Hamka. Sejak itu tulisannya banyak menghiasi majalah Gema Islam. Cak Nur meraih gelar sarjana tahun 1968 dengan skripsi berjudul Al-Qur'an '*Arabiyyun Lughatan wa 'Alamaiyyun Ma'nān* (Al-Qur'an secara bahasa adalah arab, secara makna adalah universal).<sup>4</sup>

Setelah tamat dari IAIN Jakarta, Pada tahun 1978 atas prakarsa Leonard Binder, Fazlur Rahman dan Ford Foundation, Ia mendapat kesempatan studi lanjut di universitas Chicago, Amerika Serikat, sampai meraih gelar doktor dalam bidang kalam dan filsafat dengan disertasi "*Ibn Taymiya on Kalam and Falasafah; a Problem of Reason and Revelation*" (Ibnu Taimiyyah dalam kalam dan filsafat; masalah akal dan wahyu dalam Islam) pada tahun 1984.<sup>5</sup>

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1998, tepatnya ketika iklim politik Indonesia sedang menghangat disebabkan gerakan reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi termasuk Cak Nur sendiri terlibat didalamnya. Ketika itulah Ia dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa dalam bidang ilmu filsafat Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul pidatonya; "Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi".

Cak Nur selama menjadi mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam

---

<sup>4</sup> Nur Khalid Ridwan, *op. cit*, hlm. 55.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

(HMI). Puncaknya menjadi ketua umum PBHMI (1966-1969 dan 1969-1971). Sedangkan di organisasi luar, Ia menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, 1967-1969, asisten Sekjen IIFSO (International Islamic Federation of Students Organization/ Federasi Organisasi-Organisasi Mahasiswa Islam Internasional) 1968-1971.<sup>6</sup> Selama aktif HMI, Ia banyak mengembangkan pandangan tentang jawaban Islam terhadap masalah modernisasi yang dinilai sebagai pandangan seorang muslim yang idealis, yang setelah disempurnakan oleh Endang Saifudin Anshori dan Sakip Muhammad, menjadi dokumen resmi HMI yang berjudul Nilai-nilai Perjuangan HMI. Karena pandangan inilah yang menyebabkan Ia dijuluki “Natsir Muda”.

Cak Nur pernah menjadi Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI) Jakarta (1978-1984), Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta (mulai tahun 1984), Dosen Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (mulai tahun 1985), Anggota MPR-RI (1987-1992 dan 1992-1997), Anggota Dewan Pers Nasional (1990-1998), Anggota KOMNAS HAM (mulai tahun 1993), Profesor Tamu McGill University Montreal Canada (1991-1992), Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI (1990-1995), Anggota Dewan Penasehat ICM (1996), pendiri dan ketua Yayasan Paramadina, juga sebagai Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta. Disinilah dimulai kajian-kajian Islam secara intensif, dengan menggunakan beberapa pendekatan yang menonjol,

---

<sup>6</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan.....*, *op. cit.*

diantaranya; *pendekatan filosofis, empiris-sosiologis dan spiritual*.<sup>7</sup> Dan inilah yang akhirnya menjadi studi di Paramadina dengan sistem ke-Islam-an yang menumbuhkan prinsip-prinsip pluralisme, toleransi, keadilan keterbukaan dan demokrasi.

## B. Corak Pemikiran dan Karya-Karya

Selain pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan di Gontor dan pendidikan dari Amerika, ada sedikitnya tiga hal penting yang mempengaruhi pemikiran Cak Nur; *pertama*, faktor sosial keagamaan yakni semakin transparannya disintegrasi keagamaan dan pertikaian intern umat Islam yang dikarenakan tidak adanya satu otoritas kepemimpinan. *Kedua*, faktor kehidupan politik yang mengenal tiga tahap utama proses perkembangan Indonesia, ketiga tahap itu yakni tahap orde baru, orde lama dan orde reformasi. Pada orde lama dan orde baru iklim perpolitikan negara memandang sinis terhadap aktivitas umat Islam. *Ketiga*, faktor ekonomi, realitas menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, akan tetapi umat Islam-lah yang paling miskin dan terbelakang, ditambah hegemoni

---

<sup>7</sup> Pendekatan *filosofis*, adalah suatu pendekatan terhadap Islam dengan mengandalkan nalar sehingga akan tampak sosok bangunan ajaran Islam yang memang rasional. Karena al-Qur'an berulang kali menyuruh umat Islam untuk berfikir menggali ayat-ayat Allah dengan kekuatan nalar, tanpa pengetahuan yang luas, tanpa pemikiran rasional maka banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipahami dan kebesaran Allah tidak terlihat. Pendekatan *empiris-sosiologis*, pendekatan ini memandang Islam yang memanifestasikan dalam dunia riil empiris, berkaitan dengan masalah keseharian. Karena agama berisikan bimbingan kehidupan, sedangkan yang kita sebut dengan kehidupan meliputi masalah-masalah realitas keseharian, maka pendekatan *empiris-sosiologis* terhadap agama sangat diperlukan. Oleh karena itu perlu sekali diperhatikan bagaimana Islam memberi petunjuk dan respon terhadap kehidupan sehari-hari. Pendekatan *spiritual*, di sini Islam dipahami sebagai penyejuk hati yang berfungsi memberikan siraman dan bimbingan rohani, tapi juga memberikan suatu pegangan hidup, pendekatan ini digunakan sebagai pendekatan tasawuf. Lihat Komarudin Hidayat, Dari Pondok Indah Ke Makkah al-Mukarramah; Pengantar dalam Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997, hlm. xii-xiii.

perputaran ekonomi yang dikuasai oleh sekelompok golongan yang dekat dengan kekuasaan.<sup>8</sup>

Beberapa hal yang disampaikan di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi corak pemikiran Cak Nur, tapi lebih lanjut menurut Azumardi Azra, Cak Nur merupakan sosok pemikir yang sulit untuk “dikotakkan” dalam satu tipologi yang “mutlak”, Ia terlalu sulit untuk dikaitkan pada satu sumber atau faktor, Ia boleh saja dipengaruhi Fazlur Rahman atau Ibnu Taimiyyah, pada saat yang sama Ia juga bisa berbeda dengan mereka secara sangat kreatif dan imajinatif. Inilah yang memungkinkan adanya perbedaan dalam menentukan tipologinya.<sup>9</sup>

Menurut Sufyanto tipologi pemikiran Cak Nur sebelum tahun 1970 metode yang digunakan adalah bercirikan *idealistik*,<sup>10</sup> Sedangkan setelah tahun 1970 metode yang digunakan bercirikan *realistik*.<sup>11</sup> Ini dapat dilihat sebagaimana sebelumnya Nurchlisch Madjid sebagai aktivis HMI dikenal sebagai “Natsir Muda”,<sup>12</sup> tetapi ide pembaharuannya tentang perlunya wajah

---

<sup>8</sup> Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Cak Nur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2001, hlm. 25-26.

<sup>9</sup> Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta Dan Tantangan*, Bandung: PT. Rosdakarya, Cet. ke-1, 1999, hlm. 159.

<sup>10</sup> *Idealistik* adalah suatu pemikiran yang bertolak dari pandangan pentingnya perjuangan umat untuk berorientasi pada tahapan menuju ‘Islam cita-cita’. Islam cita-cita adalah Islam sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah yang otentik, tetapi yang belum tentu tercermin dalam tingkah laku sosio-politik umat Islam dalam realitas sejarah mereka.

<sup>11</sup> *Realistik* adalah melihat adanya keterkaitan atau melakukan penghadapan antara dimensi substantif dari ajaran ataupun doktrin agama dengan konteks sosio-kultural masyarakat pemeluknya. Bagi pemikir realistik, Islam sebagai agama wahyu yang universal dan bertolak dari kesempurnaan dan keabadian doktrin, perlu hadir dan menampakkan diri secara realistik dalam keberagaman, yang diwarnai oleh perjalanan sejarah dan situasi sosial kultural umat pemeluknya.

<sup>12</sup> M. Natsir, merupakan salah seorang tokoh politik Islam Indonesia yang juga guru Cak Nur yang berpandangan tentang aliran politik *Teo-Demokrasi*, yaitu demokrasi yang mempertimbangkan nilai-nilai *transendental* (agama Islam) sebagai tujuan untuk meningkatkan

sekularisme di Indonesia dengan metode *shock therapy*-nya, yang kemudian Ia di pandang sebagai seorang yang realistik.

Dalam perjalanan selanjutnya Cak Nur dikategorikan oleh M Syafi'i Anwar sebagai seorang yang *substantivistik*<sup>13</sup> yakni refleksinya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam (*Islamic injunctions*) dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan, tetapi juga dalam format pemikiran dan kelembagaan politik mereka. Perlu diperjelas bahwa setiap kali Cak Nur melontarkan pemikiran-pemikirannya pastilah tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah politik, inilah yang menjadi ciri khas (*manhaj fikir*) Cak Nur dalam setiap gagasannya sebagai seorang tokoh pemikiran dan pengamat politik.

Cak Nur merupakan penulis yang produktif, Ia banyak menulis artikel maupun essay, dan sebagian sudah dibukukan. Sebagian karya-karyanya yang telah dibukukan antara lain:

- *The issue of modernization among Muslim in Indonesia, a participant point of view in Gloria Davies, ed. What is Modern Indonesia Culture* (Athens, Ohio, Ohio University, 1978) "Issue tentang modernisasi di antara Muslim di Indonesia, titik pandang seorang peserta dalam Gloria

---

harkat dan martabat manusia. Lihat Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm. 18.

<sup>13</sup> *Substantivistik* maksudnya adalah bahwa substansi atau makna iman dan peribadatan lebih penting dari pada formalitas dan simbolisme keberagaman serta ketaatan yang bersifat literal kepada teks wahyu Tuhan. ketiga keterangan tersebut lihat; Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1995, hlm. 155-184.

- Davies, ed. *Apakah kebudayaan Indonesia Modern* (Athens, Ohio, Universitas Ohio, 1978)".
- *Islam In Indonesia: Challenges and Opportunities*, in Cyriac K. Pullabilly, ed. *Islam in Modern World* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982) "Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang, dalam Cyriac K. Pullapilly, ed. *Islam dalam Dunia Modern* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982)".
  - *Khazanah Intelektual Islam* (Intellectual Treasure of Islam), (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
  - *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Islam, Modernity and Indonesianism), (Bandung: Mizan, 1987, 1988).
  - *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Islam, Doctrines and civilizations), (Jakarta: Paramadina, 1992).
  - *Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Islam, Populism and Indonesianism), (Bandung: Mizan, 1993).
  - *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Gates to God) (Jakarta: Paramadina, 1994).
  - *Islam, Agama Kemanusiaan* (Islam, the religion of Humanism), (Jakarta: Paramadina, 1995).
  - *Islam, Agama Peradaban* (Islam, the Religion of Civilization), (Jakarta: Paramadina, 1995).
  - "In Search of Islamic Roots for Modern Pluralism: The Indonesian Experiences." In Mark Woodward ed. *Toward a new Paradigm, Recent Developments in Indonesian Islamic Thoughts* (Teme, Arizona: Arizona

State University, 1996) “Pencarian akar-akar Islam bagi pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia”, dalam Mark Woodward ed, menuju suatu dalam paradigma baru, Perkembangan terkini dalam pemikiran Islam Indonesia (Teme, Arizona: Universitas Arizona, 1996).

- *Dialog Keterbukaan* (Dialogues of Openness), (Jakarta, Paramadina, 1997).
- *Cendekiawan dan Religius Masyarakat* (Intellectuals and Community’s Religiously), (Jakarta: Paramadina, 1999).<sup>14</sup>

### C. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Etika Politik

Pemikiran-pemikiran Cak Nur, seringkali melingkupi dua tema sekaligus, yaitu menyangkut persoalan agama dan negara. Dalam cakupan negara -meminjam istilahnya Edy A. Effendi- Cak Nur seringkali mencoba “memunguti” beberapa pikiran tercecce yang seringkali diabaikan para politisi. Pemikiran etika politik adalah satu di antaranya, yang merupakan sikap kritis Cak Nur sebagai intelektual yang gandrung akan perlunya menggairahkan proses demokrasi bergerak di sekitar kita. Proses demokrasi yang dimaksudkan adalah jika ia mampu membuka dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat.<sup>15</sup>

Sedangkan etika politik menurut Cak Nur adalah nilai-nilai asasi (luhur) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi

---

<sup>14</sup> [http://www.tokohIndonesia.com/nurcholish%20madjid/nurcholish\\_madjid.html](http://www.tokohIndonesia.com/nurcholish%20madjid/nurcholish_madjid.html), 2004.

<sup>15</sup> Edy A. Effendi, Dialog dan wacana keterbukaan, pengantar dalam Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm. xvi.

negara kita (Pancasila dan UUD 45). Maka etika politik berarti cara berpolitik yang berdasarkan nilai-nilai konstitusi negara kita (Pancasila dan UUD 45) yang mana nilai-nilai tersebut menjadi pijakan kita bersama dalam usaha membina dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam suatu struktur politik yang kita pilih dan tetapkan dalam konstitusi dengan kemungkinan pengembangan dan perbaikan terus menerus.<sup>16</sup>

Cak Nur dengan pikiran jernih menjelaskan hubungan tak langsung antara agama dan negara, yaitu pada level etika politik. Agama memberi dukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepada kemaslahatan bersama. Karena sifat negara seharusnya netral-agama, maka bahasa-bahasa etika politik itu pun harus bersifat umum. Cak Nur mengklasifikasikan nilai-nilai etika politik tersebut dalam beberapa tema pemikiran yaitu demokrasi, keadilan dan keterbukaan.<sup>17</sup>

### **1. Pemikiran Tentang Demokrasi**

Salah satu pemikiran Cak Nur adalah menyoroti tentang persoalan demokratisasi di Indonesia. Demokrasi yang dimaksudkan adalah jika ia membuka dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya” sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan sesungguhnya adalah bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Dalam alur demokrasi yang disampaikan Cak

---

<sup>16</sup> Nurcholish Madjid, *Fatsoen Nurcholish Madjid*, Jakarta: Republika, 2002, hlm. 183.

<sup>17</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0607/12/opini>. Dan lihat dalam kata pengantar buku Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Refoemasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. Xiv.

Nur terasa perlunya partisipasi politik yang luas dan otonom dari masyarakat.<sup>18</sup>

Di bawah ini akan diuraikan beberapa tema pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan persoalan demokratisasi di Indonesia, antara lain:

a. Oposisi

Pada dasarnya orang tidak bisa mengembangkan demokrasi, kalau tidak terbiasa berfikir alternatif, karena itu akan berkaitan dengan kesediaan untuk berbeda pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyatakan pikiran. Untuk itu salah satu lembaga yang diperlukan adalah lembaga oposisi. Yang sebetulnya hanyalah kelembagaan dari suatu kecenderungan yang selalu ada dalam masyarakat, yaitu adanya sekelompok orang yang tidak setuju kepada hal yang sudah mapan.<sup>19</sup>

Oposisi menurut Cak Nur tidak perlu dipahami sebagai sikap menentang (*to oppose* memang berarti menentang), sebab dalam oposisi ada pula segi *to support*-nya, sehingga dalam konteks politik oposisi lebih merupakan kekuatan penyeimbang, suatu *check and balance* yang bisa membuat perasaan-perasaan tersumbat tersalurkan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Edy A. Effendi, *loc. cit.*

<sup>19</sup> Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm.72.

<sup>20</sup> Nurcholish Madjid, *Fatsoen.....*, *loc. cit.* hlm. 171.

Pada dasarnya, perlunya oposisi bisa dimulai dengan suatu postulat yang sederhana sekali, yaitu bahwa masalah sosial dan politik tidak bisa dipertaruhkan dengan itikad baik, betapapun klaim orang itu mempunyai itikad baik, sebab yang dipertaruhkan adalah kehidupan orang banyak. Dan kalau sesuatu itu sudah bersifat sosial yang menyangkut orang banyak, maka itu harus dipersepsi, dipahami, dan di pandang sebagai persoalan yang terbuka, dimana partisipasi menjadi suatu bentuk keharusan. Salah satu bentuk partisipasi adalah oposisi, yakni suatu kegiatan sosial-politik yang mengingatkan, jangan sampai kita menjadi korban yang fatal untuk suatu kenyataan yang sederhana; bahwa manusia itu bisa selalu salah.

Ditambahkan oleh Cak Nur oposisi itu juga bersifat kekeluargaan, tetapi tidak berarti dalam keluarga itu tidak saling mengingatkan, ingat mengingatkan adalah bentuk sederhana dari *check and balance*. Sehingga oposisi tidak bertentangan dengan asas musyawarah-mufakat.<sup>21</sup>

b. Prinsip Musyawarah.

Pada dasarnya prinsip musyawarah tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan

---

<sup>21</sup> Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan....*, *op. cit.*, hlm. 27.

kebebasan pers, tapi prinsip musyawarah itu juga akan di rusak oleh sikap-sikap *absolutistic* dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggungjawab kemanusiaan: dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis.

Oleh karena itu pula demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau *egalitarianisme* yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan a priori dalam sistem-sistem *paternalistik* dan *feodalistik*.<sup>22</sup>

#### c. Pluralisme

Pluralisme menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan muslim, termasuk Cak Nur. Karena dilihat dari segi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan. Di samping itu secara sosial, Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan adat istiadat yang menunjukkan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Di sisi lain, kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sentuhan pengaruh kepercayaan dan agama-agama yang berkembang didalamnya. sehingga diperlukan kedewasaan politik, kesanggupan menerima

---

<sup>22</sup> Nurcholish Madjid, *Fatsoen.....*, *op. cit.*, hlm. 187.

perbedaan, dan menyelesaikan perbedaan tersebut dalam batas-batas keadaban politik, karena semua ini merupakan hal yang penting bagi demokrasi.

Menurut Cak Nur, pluralisme haruslah dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Artinya pluralisme adalah suatu tatanan masyarakat di mana kita harus bersedia untuk terlibat dalam keanekaragaman dan menyelesaikan persoalan dengan suatu keadaban.<sup>23</sup>

d. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara. Adanya kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan sebagaimana dinyatakan dalam nilai-nilai kesepakatan luhur dalam muqoddimah UUD 1945, akan sirna tak bermakna tanpa adanya partisipasi umum rakyat. Bahkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain pun adalah kelanjutan kedaulatan rakyat. Hal ini terbukti dengan nyata sekali dalam saat-saat kritis negara menghadapi ancaman.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

## 2. Pemikiran Tentang Keadilan

Pada prinsipnya semua manusia ingin diperlakukan secara adil, baik bidang hukum, politik maupun ekonomi. Di negara kita Indonesia, kalau kita mau melihat ke belakang persoalan ketidakadilan inilah yang seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat bangsa Indonesia.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa tema pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan persoalan keadilan, antara lain:

### a. Keadilan sosial

Kedaulatan ekonomi adalah kedaulatan yang diharapkan lahir dari adanya keadilan sosial, yang merupakan tujuan sebenarnya kita dalam bernegara, sebab dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut punya dan rasa ikut serta oleh semua. Komitmen kepada usaha untuk mewujudkan keadilan sosial, dengan ketegasan memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Pelajaran paling pahit dari pengalaman kita bernegara masa-masa terakhir ini muncul karena diabaikannya nilai keadilan sosial, dibiarkannya praktek-praktek kezaliman sosial berjalan dengan bebas dan merajalela.<sup>25</sup>

Demi itu semua, pembangunan ekonomi harus diubah dari pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, menjadi pola dan orientasi ekonomi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

rakyat patriotik. Ketangguhan ekonomi rakyat itu akan terwujud apabila kita mampu secara mandiri mengolah kekayaan alam kita, dengan tingkat kreatifitas setinggi-tingginya. Kemandirian ekonomi nasional diwujudkan dengan handalan ekonomi pertanian rakyat yang maju dan modern, dan dengan basis industri rakyat. Dalam sistem ekonomi global -suatu hal yang tidak dapat dihindari- hanya dengan ketangguhan ekonomi nasional itu kita akan mampu bersaing secara sehat, dengan hasil akhir kemenangan untuk semua, tanpa merugikan pihak manapun juga. Dan ketangguhan ekonomi nasional itu pula, kita akan lebih terlindung dari unsur destruktif keserakahan para petualang ekonomi internasional.<sup>26</sup>

b. Ketaatan hukum

Komitmen pribadi kepada nilai-nilai hidup yang luhur tidak akan bermakna apa-apa jika tidak diwujudkan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Komitmen pribadi kepada nilai-nilai luhur dapat diwujudkan dalam bentuk ketaatan pribadi kepada aturan hukum yang berlaku. Semua anggota masyarakat harus tunduk dan patuh kepada hukum dengan sikap teguh, konsekuen, berdisiplin dan penuh kesabaran dan ketabahan. Sekali suatu ketentuan aturan atau hukum di tawar untuk dilanggar, maka prinsip *rule of law* sudah dirusak, betapapun kecilnya ketentuan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

aturan yang di langgar itu, biarpun misalnya “sekedar” ketentuan harus berhenti pada lampu merah di jalan.<sup>27</sup>

c. Pemberantasan korupsi

Gunnar Midral, seorang ahli ekonomi Swedia pemenang hadiah Nobel –sebagaimana dikutip Cak Nur- memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berkembang, sebagai kelompok “negara-negara lunak”. Yang di maksud dengan “lunak” ialah tidak adanya disiplin sosial, dan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi, sosial dan politik. Kesempatan penyalahgunaan dalam ukuran besar itu terbuka untuk kelas atas, tetapi orang-orang dari kelas bawah pun sering mendapat kesempatan untuk keuntungan-keuntungan kecil, dan ini disebut sebagai gejala korupsi.<sup>28</sup>

Korupsi adalah suatu sistem politik, yang bisa diarahkan oleh mereka yang berkuasa dengan tingkat ketepatan yang bisa ditenggang. Efek paling buruk meningkatnya korupsi ialah menyebarnya sikap sinis dalam kalangan masyarakat luas serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan menerima suap pada semua lapisan birokrasi. Korupsi juga mengintroduksi

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

elemen tak rasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana (misalnya pembangunan) dengan menyimpangkan rencana itu<sup>29</sup>

Karena sudah sedemikian kompleksnya kenyataan tentang korupsi, dan sedemikian rusaknya dampak-dampak yang dihasilkannya, maka tidak ada jalan bagi usaha memberantas korupsi selain dari pada kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin. Kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin itu harus sejalan seiring dan bersama-sama.<sup>30</sup>

### **3. Pemikiran Tentang Keterbukaan**

Suatu hal yang patut kita terima dengan penuh syukur kepada Tuhan ialah kesepakatan bahwa pancasila adalah sebuah idiologi terbuka. Pancasila merupakan idiologi modern, yang diwujudkan dalam zaman yang modern dan ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan modern yaitu bapak pendiri republik Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberi landasan filosofi bersama sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia. Karena sebagai produk pikiran modern, pancasila merupakan sebuah idiologi yang dinamis, karena watak dinamis tersebut membuat Pancasila dipahami dan di pandang sebagai idiologi terbuka. Oleh karena itu tidak mungkin ia dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk selama-

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

lamanya (*one of all*), Pancasila juga tidak mengizinkan adanya badan tunggal yang memonopoli hak untuk menafsirkannya.<sup>31</sup>

Menurut Cak Nur, masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan mengambil bagian aktif dalam usaha-usaha menjabarkan nilai-nilai ideologi nasional dan mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat. Setiap usaha yang menghalanginya akan menjadi sumber malapetaka, tidak saja bagi negara dan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk tetapi juga bagi ideologi nasional itu sendiri sebagai titik tolak pengembangan pola hidup bersama. Jadi Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, sesuai dengan rancangannya sebagai landasan kehidupan sosial-politik yang plural dan modern.<sup>32</sup>

Dibawah ini akan diuraikan beberapa tema pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan persoalan keterbukaan, antara lain:

a. Pandangan Sosial Politik

Inti dari gerakan reformasi adalah kritik terhadap bentuk keadaan yang sedang berlaku, dan usaha untuk mendapatkan bentuk keadaan yang lebih baik. Karena logika itu maka suatu reformasi tidak mungkin dimulai dari nol atau ketiadaan, betapapun radikal dan fundamentalnya perbaikan yang diusahakan. Gerakan reformasi harus dipandang sebagai kelanjutan wajar dan alamiah dari tingkat kemajemukan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

masyarakat dan dinamika perkembangannya.<sup>33</sup> Menurut Nurcholish Madjid, pandangan sosial politik ini absah belaka, sepanjang tidak secara kategoris melawan dan menghalangi semangat titik temu kebaikan bersama antara semua golongan tanpa diskriminasi atau pembedaan satu dari yang lain.<sup>34</sup>

b. Prinsip Bimbingan Hidup

Prinsip bimbingan hidup yang diperlukan oleh sebuah masyarakat bebas dan merdeka ialah kesetiaan kepada hati nurani. Karena suara hati nurani selamanya bersifat individual, maka kesetiaan kepada hati nurani melibatkan perlindungan kepada kebebasan hati nurani (*freedom of conscience*). Dalam urutannya, kebebasan hati nurani mengambil bentuk nyata dalam kebebasan beragama. Sebab dengan ajaran agama, melalui keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesucian hati nurani dikukuhkan.<sup>35</sup>

Setiap jiwa manusia pada hakekatnya memiliki sifat, kebaikan dan kebenaran sebelum terbukti adalah sebaliknya. Penyimpangan dari fitrah harus di pandang sebagai faktor pengaruh negatif dari luar dirinya, yang sempat merusak fitrah itu akibat kelemahan kemakhlukannya. Karena faktor fitrah itu, maka setiap orang harus di jamin haknya untuk menyatakan pendapat.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

Tapi karena unsur kelemahan kemakhlukannya itu, maka setiap orang dituntut untuk cukup merasa rendah hati agar melihat kemungkinan dirinya salah, dan agar bersedia mendengarkan dan memperhatikan pendapat orang lain. Interaksi positif dalam semangat optimisme kemanusiaan antara hak diri pribadi untuk menyatakan pendapat dan kerendahan hati mendengarkan pendapat orang lain itu melahirkan ajaran dasar musyawarah<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP KONSEP ETIKA POLITIK NURCHOLISH MADJID DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

#### A. Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Etika Politik Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Banyak pengamat politik berpandangan sinis: “Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun”. “Etika politik itu nonsense”. Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara. Bagaimana rakyat Indonesia bisa mengakui keterlibatan moral dalam setiap pertarungan kepentingan politik, jika apa yang sedang disaksikannya adalah korupsi yang semakin melembaga dan monomer satu, tidak saja di lingkup pemerintahan (yang sudah terbiasa sejak puluhan tahun lalu) bahkan di ruang sidang para wakil rakyat yang terhormat?<sup>1</sup> Dalam konteks ini, bagaimana etika politik bisa berbicara?

Perilaku dan etika politik para elit yang kerap kali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas rakyat selalu mendapatkan komentar dari masyarakat. Baik komentar sinis, kritik sarkastis sampai pada kritik konstruktif.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, penulis ingat dengan gagasan Nurcholish Madjid (selanjutnya disebut Cak Nur) tentang etika

---

<sup>1</sup> Benny Susetyo, *Hancurnya Etika Politik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004, hlm. 3.

politik. Bagaimana seharusnya berpolitik yang baik, berwawasan kebangsaan dan berlandaskan moral Pancasila.

Cak Nur sepertinya memang sosok yang dikehendaki oleh Allah untuk merintis sebuah pembaruan Islam di Indonesia. Paradigma Islam, sejak gaung pembaruan mulai bergeliat sekitar tahun tujuh puluhan, menawarkan pendekatan baru untuk memahami Islam sebagai agama yang tidak melulu *dogma oriented*, tetapi telah melangkah ke arah fakta-fakta sosial sebagai basis pijakan, terutama dalam mengejawantahkan ajaran etis ke tataran praksis sosial. Sejak itu, Islam di Indonesia tampil dengan diskursus-diskursus yang lebih kaya, cair dan kompleks.<sup>2</sup>

Pendekatan baru tersebut, termasuk kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, Cak Nur pun lebih memikirkan segi nilai-nilai perpolitikan bukan tingkat kelembagaan seperti partai dan negara. Ia banyak berbicara tentang nilai-nilai yang dipandangnya universal, seperti demokrasi, pluralisme, egalitarianisme, dan keadilan yang di elaborasi dengan berpijak pada doktrin dan sejarah politik umat.<sup>3</sup>

Persoalan etika politik menurut Cak Nur merupakan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi negara. Dengan demikian, etika politik merupakan cara berpolitik yang berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi negara. Di Indonesia yang menjadi konstitusi

---

<sup>2</sup> Syamsul Bakri dan Mudhofir, *Jombang Kairo, Jombang Chicago, Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai, 2004, hlm. 101.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 109.

negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, ciri politik kita harus berlandaskan pada keduanya.

Cak Nur juga menghubungkan etika politik dengan agama dan negara. Menurutnya hubungan antara agama dan negara, secara tidak langsung agama memberi keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepada kemaslahatan bersama. Negara seharusnya netral terhadap agama, sehingga bahasa dalam etika politik pun harus bersifat umum. Karena tujuan utama yang akan dicapai dari etika politik adalah terbentuknya nilai-nilai (moral) politik yang berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terwujudnya demokratisasi dan keadilan sosial.

Menurut Saint Hilaire, mewujudkan suatu sistem etika yang tidak dilandasi oleh suatu kepercayaan (iman) adalah sesuatu yang sulit diwujudkan. Peralannya, ia adalah modal bagi ketenangan jiwa sebelum seseorang menentukan suatu tindakan tertentu.<sup>4</sup>

Jauh sebelumnya, seorang ahli etika di masa Yunani kuno, Epicurus, juga menyatakan hal yang serupa. Menurutnya, jiwa seseorang selalu dibelenggu oleh ketakutan terhadap dewa-dewi dan perasaan kematian sehingga menyebabkan orang terus-menerus berada dalam rasa ketegangan. Untuk itu manusia harus membebaskan diri dari kedua hal yang menakutkan itu. Mereka membutuhkan adanya “keyakinan lain” yang mampu memberikan

---

<sup>4</sup> Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 132.

rasa percaya diri dan rasa tenang dalam jiwanya sehingga mampu menghadapi berbagai permasalahan kehidupan.<sup>5</sup>

#### 1. Urgensi Etika Politik

Etika politik bukan hanya masalah moral individual. Dalam moral individual hubungan antara visi seorang dan tindakannya langsung. Seseorang bisa langsung menerapkan di dalam tindakannya bila mempunyai pandangan tertentu. Bila tuntutan keshahihan norma terpenuhi, bisa langsung diterjemahkan ke tindakan. Sedangkan etika politik merupakan masalah etika sosial, tidak bisa dilepaskan dari tindakan kolektif dan struktur sosial. Maka, tidak cukup bahwa premis normanya shahih. Masih harus ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Meskipun seseorang mempunyai gagasan bagus belum tentu bisa diterapkan dalam tindakan kolektif. Perlu proses persuasi agar bisa diterima oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat.

Jadi hubungan antara visi dan tindakan tidak langsung, harus melalui mediasi (perantara). Mediasi ini berupa simbol-simbol dan nilai-nilai, simbol-simbol agama, demokrasi, nilai-nilai keadilan, solidaritas, kebebasan. Nilai-nilai dan simbol-simbol itu mengantar kepada kesepakatan untuk bertindak. Etika politik erat terkait dengan motivasi, sarana dan tujuan tindakan kolektif (subyektif). Akan tetapi, ada faktor

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

obyektif tindakan kolektif, yaitu struktur sosial. Struktur sosial mengkondisikan tindakan kolektif, mempermudah atau menghambat.<sup>6</sup>

Dengan demikian menjadi jelas bahwa etika politik mengandalkan pemahaman dialektika aktor dan struktur sosial, artinya struktur-struktur sosial hanya ada karena diciptakan, dihidupi, dipelihara oleh pelaku-pelaku sosial, maka perubahan struktur sosial pun hanya bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku sosial, sebaliknya, pelaku sosial, kendati bebas, dikondisikan oleh struktur-struktur sosial tersebut. Dimensi moral berhadapan dengan struktur-struktur sosial tersebut terletak di dalam pilihan-pilihan orang akan tatanan sosial, politik atau ekonomi yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama.

Paul Ricœur dengan tajam mendefinisikan etika politik. “Etika politik ialah upaya untuk semakin memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil”. Definisi ini mengacu pada:

*Pertama*, lingkup kebebasan, yang di maksud tentu saja adalah kebebasan sosial-politik, artinya syarat-syarat fisik, sosial dan politik yang perlu untuk pelaksanaan kongkrit kebebasan, termasuk jaminan terhadap hak-hak. Ini mencakup kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Dr. Haryatmoko, “*Etika Politik Bukan Hanya Moralitas Politikus*” lihat dalam <http://tumasouw.tripod.com>

*Kedua*, menciptakan institusi-institusi yang lebih adil. Mengapa keadilan menjadi keutamaan terpenting dari institusi sosial? Ini tidak bisa dilepaskan dari struktur masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Etika Politik dalam Islam

Dari perspektif Islam, gejala kemerosotan etika politik, atau bahkan etika public pada umumnya tidak hanya sangat memprihatinkan, tetapi juga kontradiktif dengan demokrasi yang sedang tumbuh; karena pada dasarnya tidak ada demokrasi tanpa etika politik. Tanpa etika politik yang terjadi hanyalah distorsi-distorsi dalam pertumbuhan demokrasi. Dan sebaliknya, etika politik sulit terwujud tanpa demokrasi.

Nilai-nilai etika, moral atau lebih tegas dan lebih luas *akhlaq al-karimah* merupakan salah satu tema pokok Islam, yang berada pada posisi kedua setelah ajaran tauhid. Persoalan etika, moral dan akhlaq dalam Islam, memiliki kedudukan yang sangat sentral dan penting. Hal terlihat dari hadits Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus (oleh Allah SWT.) untuk menyempurnakan akhlaq mulia*”.

Di dalam al-Qur’an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang juga didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansinya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain tersebut.

Konsep tersebut antara lain:<sup>8</sup>

a. Kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*)

Prinsip ini terdapat dalam Qur'an Surat an-Nisa' 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿58﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hokum-hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’: 58)*<sup>9</sup>

Dalam konteks kenegaraan, amanah berarti kekuasaan ataupun kepemimpinan. Sebab, pada prinsipnya, kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan orang-orang yang dipimpinya. Dengan demikian, posisi pemimpin baik dalam arti formal maupun non formal membawa konsekuensi pada tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Apakah ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin atau tidak.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara & Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. 74-75.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 69

<sup>10</sup> Faisal Baasir, *op. cit.*, hlm. 145-146.

b. Keadilan (*al-‘Adilah*)

Ajaran lain Islam yang mengandung unsur etika bermasyarakat adalah menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. Banyak sekali firman Allah maupun hadits Nabi yang secara langsung berbicara soal keadilan dalam masyarakat ini. Islam tidak menghendaki bahwa dunia beserta isinya hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat sementara mereka yang lemah tidak mendapatkan apa-apa dan harus tersingkir dari muka bumi.

Diantara seruan Allah tentang keadilan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

﴿8﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikap adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu lakukan.” (QS. Al-Maidah: 8)<sup>11</sup>*

c. Persaudaraan (*al-ukhuwah*)

Prinsip ini antara lain terdapat dalam QS. al-Hujurat ayat 10: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara.*” Dengan ijtihad tentang hubungan antar warga Negara pada saat ini yang mengalami perkembangan, persaudaraan ini kemudian dikembangkan menjadi

---

<sup>11</sup> Depag RI, *op.cit*, hlm. 86

*ukhuwwah basyariyyah* (persaudaran kemanusiaan), yang didukung pula oleh ayat al-Hujurat: 13.<sup>12</sup>

d. Menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'addudiyah*)

Prinsip ini terkandung dalam firman Allah Surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿13﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa”. (Q.S. Al-Hujurat: 13)<sup>13</sup>

e. Permusyawaratan (*as-syura*)

Al-Qur'an menjadikan musyawarah sebagai salah satu karakter yang terpuji sejajar dengan iman kepada Allah, tawakkal kepada-Nya, meninggalkan dosa-dosa besar dan mendirikan shalat.<sup>14</sup> Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿36﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿37﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿38﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿39﴾

<sup>12</sup> Masykuri Abdillah, *op. cit.*, hlm. 74. lihat juga Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, cet. II, 1990, hlm. 6.

<sup>13</sup> Depag RI, *op.cit*, hlm. 412

<sup>14</sup> Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, ....hlm. 85-86.

*Artinya: “Apapun yang kamu miliki adalah kesenangan hidup duniawi dan apa yang ada disisi Allah adalah lebih baik dan abadi bagi mereka yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhan. Dan mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan jika mereka marah, mereka mudah memaafkan. Dan mereka yang memenuhi seruan Tuhan, mendirikan shalat, memusyawarahkan masalah antara mereka, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Dan mereka yang apabila ditimpa penindasan mereka memperoleh kemenangan.” (QS. As-Syura: 36-39).<sup>15</sup>*

f. Mendahulukan perdamaian (*al-silm*)

Dalam ajaran agama Islam, prinsip perdamaian sangat diperhatikan, apalagi perdamaian antara sesama manusia dan antar bangsa. Keanekaragaman suku, bangsa dan budaya dijadikan Allah adalah untuk saling mengenal dan bekerjasama dengan menjaga dan memelihara perdamaian di antara mereka. Sehingga setiap manusia di dalam Islam dituntut untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhkan kemunkaran.<sup>16</sup>

g. Ketaatan pada Pemimpin

Prinsip ketaatan terhadap pemimpin yang sah dalam konteks Islam bersifat *limitative*. Dalam hal ini ketaatan rakyat terhadap pemerintah bersifat wajib sejauh mana ketaatan itu menuju pada kebenaran. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan kesalahan maka rakyat berhak untuk mengkritik setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa agar kembali pada jalur kebenaran.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Depag RI, *op.cit*, hlm. 389

<sup>16</sup> Faisal Baasir, *op. cit.*, hlm. 164.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

Uraian di atas, apabila kita perhatikan memiliki beberapa kesamaan dengan gagasan Cak Nur tentang etika politik. Menurut Cak Nur, Islam pernah menjadi tauladan sebuah sistem politik, yang seperti sudah dikemukakan di atas, pada masa itu sangatlah modern. Prinsip persamaan, prinsip keadilan, tanggung jawab dan lain sebagainya, yang dikemukakan Cak Nur juga sama dengan konsep Islam politik, di sinilah secara teologis, Cak Nur membuat bangunan teoritis mengenai keterkaitan organik antara nilai-nilai iman itu dengan demokrasi, keadilan, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan (yang sering diterjemahkannya sebagai “kehendak bersama” bahkan suatu “kontrak sosial”).<sup>18</sup>

Hal ini berarti, iman kepada Allah, menurut Cak Nur menuntut segala hal menyangkut sesama manusia, diselesaikan melalui musyawarah - partisipatif, suatu proses timbal balik (*reciprocal*)- antara para pesertanya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Selain itu, menurut Cak Nur deskripsi mengenai masyarakat-masyarakat orang beriman inilah sebagai masyarakat musyawarah, telah sedemikian mengesankannya bagi orang-orang muslim pertama, sehingga surah dalam al-Qur'an yang memuat deskripsi itu disebut “*Surah Syura*” atau musyawarah. Ini pun menjadi dasar yang penting dalam pemikiran politik

---

<sup>18</sup> Budhy Munawar Rachman dalam Kata Pengantar Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. Xxxiv.

Islam, karena “musyawarah yang benar...tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia-manusia atau egalitarianisme yang kuat.”<sup>19</sup>

## **B. Analisis Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Etika Politik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Konteks Kekinian**

Hampir tidak ragu lagi, kemerosotan etika politik merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia sejak bermulanya masa “reformasi” menyusul jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada Mei 1998. Kemerosotan etika politik pada masa reformasi itu bisa dilihat dalam berbagai kecenderungan dan indikasi, mulai dari semakin meluasnya tindakan-tindakan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), *money politics*, sampai demonstrasi-demonstrasi massa yang tidak mempedulikan etika politik, yang kemudian bukan tidak sering *out of control* berubah menjadi anarkhi. Semua gejala ini tambah memprihatinkan ketika suara-suara yang menghimbau penegakan kembali etika politik “seperti batu jatuh ke lubang” hilang tanpa bekas.<sup>20</sup>

Dari sini kita dapat menarik hipotesis bahwa masalah utama yang dihadapi bangsa kita ini adalah masalah moral, masalah akhlaq. Persoalan inilah yang menjadi pemicu terjadinya kondisi kehidupan yang masih belum menentu sekarang ini. Etika pribadi, etika antar pribadi atau etika umum, moralitas publik, akhlaq pribadi dan akhlaq kolektif kita sebagai bangsa terus

---

<sup>19</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 191.

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, “Etika Politik: Perspektif Islam” dalam Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, pada halaman Kata Pengantar.

menerus mengalami kemerosotan dan bahkan ada yang lebih skeptis lagi menganggapnya sudah mengalami keruntuhan total sama sekali.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, semua upaya yang dilakukan yang semula dianggap sebagai resep obat mujarab, tidak juga kunjung berhasil menyelesaikan permasalahan karena tidak menyentuh upaya perbaikan moralitas dan etika, baik dalam peri kehidupan perseorangan, keluarga, maupun kelompok, bermasyarakat dan bernegara sebagai keseluruhan.<sup>22</sup>

Secara singkat, banyak konsep, ajaran tentang etika Islam seperti disinggung di atas juga mengalami transmisi ke Indonesia, sebagiannya bahkan diadopsi menjadi undang-undang dan pedoman etika politik pada berbagai kesultanan dan kerajaan Islam di Kepulauan Nusantara. Dalam prosesnya tidak bisa dihindari lagi terjadi percampuran dengan adat istiadat lokal berkenaan dengan etika dan tingkah laku yang patut dan pantas dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara.

Kalau pada sub bab sebelumnya di jelaskan bagaimana gagasan Nucholis Madjid apabila ditinjau dari fiqh siyasah atau politik Islam, pada sub bab ini penulis berusaha mendeskripsikan bagaimana relevansi pemikiran Cak Nur tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kontek kekinian?.

Sejak awal 1970-an, pemikiran politik Cak Nur tentang kebangsaan memberi kita renungan amat penting tentang hubungan agama dan negara,

---

<sup>21</sup> Jimly As-Shiddiqie, *Perbaikan Akhlak Bangsa dengan Melembagakan Infra-Struktur Etika*, dalam Faisal Baasir, *op. cit.*, hlm. vii.

<sup>22</sup> *Ibid.*

yang muncul kembali di era otonomi daerah melalui banyak peraturan daerah yang bersifat keagamaan.

Campur aduk kepentingan agama dan negara menjadikan agama ikut campur dalam urusan negara. Negara juga ikut campur dalam urusan agama. “Perselingkuhan” ini -begitu istilah yang kini sering dipakai- mengakibatkan dampak pada ruang kebebasan beragama kian sempit, dan terasa sesak di Indonesia, seperti terlihat dalam banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama belakangan ini.<sup>23</sup>

Tahun 2005-2006 adalah tahun paling mundur dalam perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Keadaan ini menyuburkan kekhawatiran Cak Nur sejak lama, yaitu menguatnya fenomena radikalisme Islam di Indonesia, yang dikhawatirkan akan merusak wajah Islam moderat dalam kehidupan masyarakat.

Cak Nur dengan pikiran jernih menjelaskan hubungan tak langsung antara agama dan negara, yaitu pada level etika politik. Agama memberi dukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepada kemaslahatan bersama. Tiga nilai etika politik yang amat kompatibel dengan agama yang selalu Cak Nur elaborasi adalah: keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Karena sifat negara seharusnya netral-agama, maka bahasa-bahasa etika politik itu pun harus bersifat umum.

Persis di sinilah Cak Nur menegaskan arti Pancasila sebagai *common platform* atau titik temu nilai-nilai dari semua suku, ras, golongan, dan

---

<sup>23</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Cak Nur dan Indonesia Modern*, lihat dalam <http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/opini>.

khususnya agama-agama yang ada di Indonesia. Mengelaborasi filosofi tentang Pancasila termasuk hal yang menjadi *concern* Cak Nur bertahun-tahun.<sup>24</sup>

Meski dalam mengelaborasi Pancasila, Cak Nur sering mengaitkan dengan al-Qur'an, misalnya, tetapi pikiran-pikirannya bisa diamini siapa pun, tidak tergantung agamanya apa. Inilah sisi universal pemikiran Cak Nur. Ia seorang ahli Islam, tetapi begitu universal dan kosmopolit ke-Islam-annya, pikiran-pikirannya mempunyai pengaruh pada semua kalangan. Jenis pemikiran Islam yang dalam istilah Cak Nur *haniffiyat al-samhah* - kecenderungan beragama yang terbuka dan penuh kelapangan- inilah yang terus ditegaskan, dan kini kita warisi.<sup>25</sup>

Cak Nur juga menegaskan demokrasi sebagai cara, bukan tujuan. Dalam pikiran Cak Nur, suatu tujuan yang dicapai secara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis. Apalagi, seperti istilah filsuf eksistensial yang sering dikutip Cak Nur, Albert Camus, menegaskan tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan.

Jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut membenarkan tujuan yang dicapai. Inilah menurut Cak Nur salah satu sendi pandangan hidup demokratis. "Pandangan hidup demokratis bertumpu dengan teguh di atas asumsi bahwa cara harus

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 208-110.

bersesuaian dengan tujuan". Ketentuan inilah, menurut Cak Nur, jika dipraktekkan akan memancarkan tingkah laku demokratis dan membentuk moralitas demokratis.<sup>26</sup>

Dalam mengelaborasi Pancasila, menurut Cak Nur, prinsip demokrasi sebagai cara itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila, dalam pikiran Cak Nur, dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Kita telah diberi inspirasi oleh para pendiri bangsa untuk memandang seluruh sila itu sebagai kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan.

Maka, pikiran kebangsaan Cak Nur yang pernah menjadi kontroversi besar di kalangan umat Islam sejak 1970-an sebenarnya merupakan filosofi membangun pondasi ke-Indonesia-an, seperti Pancasila, termasuk di dalamnya menempatkan peranan agama dalam politik.

Cak Nur selalu menegaskan, peran agama dalam politik ada pada level moralitas, bukan politik!. Khusus soal moralitas inilah Cak Nur amat prihatin pada keadaan masyarakat Indonesia. Ada hukum yang Cak Nur kemukakan -dalam bahasa Latin- *corruptio optimi pessima* ("kejahatan oleh orang terbaik adalah kejahatan yang terburuk", "*corruption by the best is the worst*"), maka pelanggaran prinsip keadilan dan keseimbangan -yang merupakan salah satu pikiran etika politik yang selalu ditekankan Cak Nur- oleh kaum Muslim akan mendatangkan malapetaka berlipat. Hukum yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 209.

sama sebenarnya berlaku atas para penganut setiap agama, sebab setiap agama juga mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Hal lain mengenai kebangsaan yang memprihatinkan Cak Nur adalah keadaan negara Indonesia sebagai *soft state*. Menurut Cak Nur, Indonesia adalah “negara lunak”, negara yang pemerintahan dan warganya tidak memiliki ketegaran moral, khususnya moral sosial-politik. Cak Nur sering menegaskan mengenai penyakit sosial-politik bangsa Indonesia yang disebutnya penyakit “kelembekan” (*leniency*), “sikap serba memudahkan” (*easy going*), sehingga tidak memiliki kepekaan terhadap masalah penyelewengan dan kejahatan seperti korupsi.

Kasus korupsi, yang semakin merajalela pada masa pasca orde baru, inilah yang membuat rakyat dan masyarakat tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa gara-gara ulah penguasanya. Mereka bahkan harus memberikan upeti atau kontribusi kepada penguasa untuk mendapat *favor* dari penguasa. Semua inilah yang kemudian disebut sosiolog Max Weber sebagai sumber dari munculnya karakter kekuasaan politik Muslim sebagai “*soft state*”, negara lembek, dimana seolah-olah tidak terdapat dan berlaku etika politik yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara; hasilnya adalah distorsi dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>27</sup>

Distorsi etika politik berkelanjutan di masa kolonialisme, baik Belanda, maupun Jepang. Melanjutkan absolutisme kekuasaan pada masa kerajaan dan kesultanan, kedua kekuatan kolonialisme menghasilkan berbagai

---

<sup>27</sup> Azyumardi Azra, *op. cit.*, hlm. xxi.

distorsi etika politik. Rakyat Indonesia yang merupakan lapisan terbawah dalam stratifikasi hukum dan sosial kolonialisme menyaksikan dengan mata telanjang dan penuh kepedihan bagaimana distorsi-distorsi itu merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam masa selanjutnya, setelah tercapainya kemerdekaan bangsa, baik masa orde lama (Soekarno), masa orde baru (Soeharto) maupun masa reformasi, etika politik yang sehat belum juga terbangun. Di atas telah dijelaskan secara gamblang oleh Nurcholish Madjid tentang etika berbangsa dan bernegara.

Gagasan politik Cak Nur apabila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks kekinian tentunya sangat relevan, karena sampai saat ini bangsa Indonesia masih memerlukan sistem dan tatanan yang baik dan sesuai. Inilah saatnya bangsa Indonesia membenahi dan menata kembali bukan hanya kerangka sistem politik Indonesia yang menjadi lebih demokratis, berkeadilan sosial tetapi juga sekaligus mengaktualisasikan etika politik yang –seperti dikemukakan di atas– cenderung diabaikan.

Nurcholish Madjid dengan gagasan etika politiknya, telah memberikan sumbangsih pemikiran, terutama dalam bidang perpolitikan nasional yang menyangkut etika politik. Dengan demikian, diharapkan kontribusi pemikiran yang telah dipaparkan di atas, bisa menjadikan subyek etika politik sebagai sebuah wacana publik, yang pada gilirannya nanti dapat betul-betul teraktualisasi dalam negara-bangsa Indonesia yang demokratis dan berkeadaban.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami dan menganalisis pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Etika politik menurut Nurcholish Madjid merupakan nilai-nilai asasi (luhur) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi negara kita (Pancasila dan UUD 45). Dalam fiqh siyasah, etika politik Cak Nur memiliki kesamaan konsep. Konsep yang dimaksud adalah prinsip demokrasi yang dalam konsep Islam disebut *syura*/musyawarah, keadilan sosial (*al-'Adillah*) yang mencakup ketaatan hukum, pemberantasan korupsi dan ketaatan kepada pemimpin. Dalam Islam hal tersebut juga diatur cukup jelas, beberapa ayat yang membahas tentang demokrasi, keadilan sosial di antaranya adalah surat al-Maidah: 8, an-Nisa': 58, al-Hujurat 10-13, asy-Syura: 36-39 dan lain sebagainya.
2. Relevansi dari pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian, sangat cocok apabila diterapkan masa sekarang. Karena sampai saat ini bangsa Indonesia masih dilanda krisis multidimensi dan yang paling mendominasi adalah krisis moral. Oleh karena itu, aktualisasi etika politik bagi elit politik maupun masyarakat Indonesia harus diwujudkan, demi kemajuan dan kesejahteraan negara dan bangsa kita ini.

## **B. Saran-saran**

Demikianlah sekilas tentang etika politik. Mudah-mudahan dapat menjadi refleksi bagi bangsa ini, meski hanya bagian yang sangat kecil. Tapi sekecil apapun hal tersebut harus dilakukan terutama untuk menjernihkan dan mengangkat berbagai persoalan masyarakat yang ada yang tidak tersentuh oleh elit politik.

Peradaban, bagaimanapun juga, harus memiliki moral yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan nilai-nilai humanisme. Tugas tersebut teremban di pundak setiap anak negeri ini. Perjuangan memang bukan hanya kata-kata, namun perjuangan tidak mungkin terlaksana tanpa kata-kata yang teruntai dalam setiap bait tulisan. Gerakan etika politik atau moral politik perlu diserukan kepada segenap manusia di muka bumi ini, agar nilai-nilai penghargaan atas harkat manusia bisa diwarnai dengan nilai-nilai kebaikan, yang tentunya masih dalam batas-batas ajaran syari'ah Islam.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Agung, berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, kekeliruan dan kekurang-sempurnaan merupakan keniscayaan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Atau paling tidak dapat

memperkaya khazanah intelektual Islam di IAIN Walisongo Semarang.

*Wallahu A'lam bi al-Shawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Sukandi, *Prof. Dr. Nurcholish Madjid; Jejak Pemikiran dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-2, 2003.
- Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Sirkahu, t.t.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *As-Siyasah Asy-Syari'iyah*, Terj. Kathur Sunardi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Amin, Ahmad, *Ethika; Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1995.
- Anwar, Syafi'I, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1995.
- AR, Zahrussin, dan Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azra, Azumardi, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta Dan Tantangan*, Badung: PT. Rosdakarya, Cet. ke-1, 1999.
- Azwar, Saefudin, M.A. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ba'asir, Faisal, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Bakri, Syamsul, dan Mudhofir, *Jombang Kairo, Jombang Chicago, Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- Bertens, K, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-5, 2000.
- Daulay, Hamdan, *Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, Cet. ke-1, 2001.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Ge, Liang, *Ilmu Politik*, Jakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 1990.
- Ghazali, Adeng Muchtar, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2004.
- Hapsin, Abu, *Kenapa Politisi Kita Tidak Beretika*, Jurnal Justisia. Edisi 25, Tahun 2004.
- Haryatmoko, Dr., "Etika Politik Bukan Hanya Moralitas Politikus" lihat dalam <http://tumasouw.tripod.com>
- Hidayat, Komarudin dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara & Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- , *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998.

- Hikam, Muhammad AS, *Konflik Dan Resolusi Konflik Etnik di Indonesia; Perspektif Konflik Kewarganegaraan*, Makalah Lokakarya dan Temu Nasional BEM Indonesia, UPN Veteran Yogyakarta, 6-9 Agustus 2002.
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0607/12/opini>.
- [http://www.tokohIndonesia.com/nurcholish%20madjid/nurcholish\\_madjid.html](http://www.tokohIndonesia.com/nurcholish%20madjid/nurcholish_madjid.html).  
2004.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Refoemasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998.
- , *Fatsoen Nurcholish Madjid*, Jakarta: Republika, 2002.
- , *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- , *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997.
- , *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1994.
- Makmurtono, Agus dan Munawir, *Etika (Filsafat Moral)*, Jakarta: Wira Sari, Cet. ke-1, 1989.
- Moekijat, *Azas-Azas Etika*, Bandung: Masdar Maju, Cet. ke-1, 1995.
- Moten, Abdul Rasid, *Political Science; An Islamic Perspective*, Terj. Munir, A. Mulin dan Widyawati, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 2001.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Ideologi Gerakan Dakwah; Episod Kehidupan M Natsir dan Azhar Basyir*, Yoyakarta: Sipress, 1996.
- Munawar, Budhy - Rachman, *Cak Nur dan Indonesia Modern*, lihat dalam <http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/opini>.
- Muslim Nurdin, ed. *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: CV. Alfabet.
- Muslim, *Shahih Muslim; Bab Wujud Al-Tha'ah Al Umara' Fi Ghairi Ma'shiat*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, tt.
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Rajawali, 1999.

- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2000.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Panggabean, Samsurizal, “Energi Utopia Nurcholish Madjid” *Ulumul Qur’an*, No. 1, Vol. IV. Tahun 1993.
- Pickles, Dorothy, *Introduction to Politics*, Terj. Sahat Simamora, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Poedjawijatna, *Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-7, 1990.
- Prayitno, S., *Penguatan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Nasional Sesuai Tap MPR-RI No/5/MPR/2000*, Makalah Temu Forum Komunikasi Etnis Lokal Prop Jateng, Badan Kesbanglinmas Jawa Tengah, Hotel Kesambi Hijau, 26-27 agustus 2003.
- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. ke-2, 1996.
- Ridwan, Nur Khalid, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Rohman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur’an*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983.
- Shiddiqi, Nourouzzman, (et. al), *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. ke-1, 1986.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, Cet. II, 1990.
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Cak Nur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2001.
- Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Jakarta: Kompas, Cet. ke-2, 2001.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika dasar*, Jakarta: Kanisius, Cet. ke-6, 1993.
- , *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet. ke-2, 1988.
- , *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, PT. Gramedia, 1993.
- Susetyo, Benny, *Hancurnya Etika Politik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Syafi’i, Inu Kencana, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1994.
- Syukur, M. Amin, *Etika Keilmuan*, *Jurnal Theologia*, Semarang: Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo, Edisi No 28, Juni Tahun 1999.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1996.
- Umary, Barmawei, *Materia Akhlak*, Solo: Ramadhani, Cet. ke-11, 1993.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Muamar  
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 19 Juni 1981  
Agama : Islam  
Alamat :  
- Rumah : Desa Bangsri RT 02 RW 02 Kec. Bangsri Kab. Jepara 59453  
- Kost : Wisma Bondet. Tanjung Sari Barat RT. 07 RW. V Tambakaji Ngaliyan Semarang 50185

### **PENDIDIKAN:**

1. Sekolah Dasar : MI. Hasyim Asy'ari lulus 1993
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : MTs. Hasyim Asy'ari lulus 1996
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas : MA. Hasyim Asy'ari lulus 1999
4. Sarjana Strata I : IAIN Walisongo Semarang lulus 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2007

Hormat saya,

**M. Muamar**  
2100113